

**PENERAPAN *ACTIVITY BASED COSTING* PADA BANK
PERKREDITAN RAKYAT DALAM MENENTUKAN SUKU
BUNGA KREDIT YANG TEPAT
(Studi Kasus pada PT BPR XYZ)**



Oleh

PRIYAMBUDI SUJIWO PRATOMO

200612060

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi Sebagian Syarat
Dalam Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

INDONESIA BANKING SCHOOL

JAKARTA

2010

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada hamba-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Penerapan *Activity Based Costing* pada Bank Perkreditan Rakyat dalam Menentukan Suku Bunga Kredit yang Tepat (Studi Kasus pada PT BPR XYZ)**”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi di STIE Indonesia Banking School Jakarta. Penulis menyadari tidak akan mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini tanpa bantuan, dukungan, bimbingan, sumbangan pemikiran, pengarahan, kritik serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Taufiq Hidayat, SE.Ak, MBankFin, selaku dosen pembimbing yang atas bimbingan, ilmu, motivasi, kesabaran, dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Ibu Dr. Siti Sundari Arie selaku Ketua STIE Indonesia Banking School.
3. Ibu Etika Karyani, SE., Ak, MSM, selaku Ketua Jurusan Akuntansi STIE Indonesia Banking School.
4. Bapak Erric Wijaya, SE.,ME, selaku pembimbing akademik atas bimbingan, saran dan nasihat selama penulis menjalani perkuliahan di STIE Indonesia Banking School.
5. Bapak Dede Achmad Bachrum, selaku pejabat beserta karyawan PT BPR XYZ yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian serta masukan dan data yang dibutuhkan penulis.

6. Seluruh staf pengajar STIE-IBS yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya.
7. Seluruh staf administrasi, kebersihan, dan kemananan STIE-IBS yang telah membantu penulis sehingga dapat mengikuti perkuliahaan dengan baik.
8. Papa Eko, Mama Effi, Adikku Irza, Dito, Fio, dan Ines tersayang tercinta, atas perhatian, doa, bimbingan, dan motivasi.
9. Keluarga Besar dari Papa dan Mama atas perhatian dan masukan.
10. Siska Kristiyanna Fauzie dan Mama Titi yang selalu memberikan perhatian, motivasi, nasihat, dan doa selama pengerjaan skripsi.
11. Rekan Dewan Mahasiswa Periode 2008-2009, serta almamater tercinta dan teman-teman Angkatan 2004-2009.
12. Bapak dan Ibu pengurus Perpustakaan LIPI dan LPPI.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu di sini.

Semoga Allah SWT memberi karunia-Nya yang setimpal kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis. Penulis menyadari kekurangan dari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritik demi kebaikan karya penulis di masa mendatang. Semoga penyusunan skripsi ini akan memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang bersangkutan. Amin.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Jakarta, 19 September 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI KOMPREHENSIF	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Masalah Penelitian.....	6
1.2.1 Perumusan Masalah	6
1.2.2 Pembatasan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II. LANDASAN TEORITIS	
2.1. Bank.....	9
2.1.1 Bank Umum.....	10
2.1.2 Bank Perkreditan Rakyat.....	10
2.2 Kredit.....	11
2.2.1 Pengertian Kredit	11
2.2.2 Unsur Kredit	12
2.2.3 Tujuan Kredit.....	13
2.2.4 Fungsi Kredit	14
2.2.5 Jenis Kredit.....	15
2.2.6 Penentuan Tingkat Suku Bunga Kredit (<i>Loan Pricing</i>)	17

2.3	Biaya	23
2.4	<i>Activity Based Costing</i>	25
	2.4.1 <i>Cost Driver</i>	27
	2.4.2 Pembebanan Biaya <i>Overhead</i> dengan Sistem ABC .	27
	2.4.3 ABC pada Bank	28
2.5	Penelitian Terdahulu	33
2.6	Kerangka Pemikiran	36
 BAB III. METODOLOGI PENELITIAN		
3.1	Pemilihan Objek Penelitian.....	38
3.2	Data yang Dihimpun.....	39
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.3	Metode Analisis Data	40
 BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	42
	4.1.1 Pemegang Saham dan Pengurus PT BPR XYZ.....	43
	4.1.2 Produk PT BPR XYZ.....	44
	4.1.3 Struktur Organisasi PT BPR XYZ.....	46
4.2	Perhitungan Alokasi Biaya <i>Overhead</i> Terhadap Suku Bunga Kredit dengan ABC	50
	4.2.1 Mengidentifikasi Produk yang Menjadi Objek Biaya.....	54
	4.2.2 Mengidentifikasi Biaya Langsung dari Produk	56
	4.2.3 Memilih Dasar Alokasi Biaya untuk Mengalokasikan Biaya Tidak Langsung	57
	4.2.4 Mengalokasikan Dasar Alokasi Biaya ke Objek Biaya	63
	4.2.5 Menghitung Tarif per Unit dari Masing-Masing Dasar Alokasi Biaya yang Digunakan Untuk Mengalokasikan Biaya Tidak Langsung ke Produk	65
	4.2.6 Menghitung Biaya Tidak Langsung yang Dialokasikan ke Produk.....	66
	4.2.7 Mengalokasikan Biaya Tidak Langsung Setiap Produk Terhadap Suku Bunga Kredit	67
4.3	Perhitungan Suku Bunga Kredit dengan Alokasi Biaya	

<i>Overhead</i> Hasil ABC	69
4.4 Perbandingan Suku Bunga Kredit pada PT BPR XYZ dengan Suku Bunga Kredit Hasil Perhitungan ABC	72
BAB V. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	75
5.2. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Biaya Tidak Langsung Buckeye National Bank	29
Tabel 2.2	Data Alokasi Biaya Tidak Langsung Metode Tradisional.....	30
Tabel 2.3	Data Aktivitas dan <i>Cost Driver</i>	31
Tabel 2.4	Data <i>Cost Driver</i> pada Lini Nasabah	32
Tabel 2.5	Data Alokasi Biaya Tidak Langsung Metode ABC	32
Tabel 2.6	Hasil Penelitian Ilustrasi Metode Tradisional dan ABC.....	33
Tabel 2.7	Penelitian Terdahulu Terkait ABC	33
Tabel 4.1	Daftar Pemegang Saham.....	43
Tabel 4.2	Realisasi Biaya <i>Overhead</i> PT BPR XYZ Tahun 2009	52
Tabel 4.3	Data Beban Personalia per Bulan	53
Tabel 4.4	Data Pengajuan Kredit Tahun 2009.....	55
Tabel 4.5	Data Rekening Kredit Diterima Tahun 2009	55
Tabel 4.6	Data Baki Debet Tahun 2009	56
Tabel 4.7	Alokasi Jam Kerja Terhadap Aktivitas	58
Tabel 4.8	Perhitungan Alokasi Beban Personalia terhadap Aktivitas Kredit	59
Tabel 4.9	Perhitungan Alokasi Beban Personalia terhadap Aktivitas Dana dan Umum	60
Tabel 4.10	<i>Cost Pool</i> per Aktivitas.....	61
Tabel 4.11	Dasar Alokasi Biaya per Aktivitas	63
Tabel 4.12	Alokasi Dasar Alokasi Biaya per Objek Biaya	64
Tabel 4.13	Perhitungan Tarif per Unit Dasar Alokasi Biaya.....	65
Tabel 4.14	Perhitungan Biaya Tidak Langsung Produk Kredit Konsumtif ...	66
Tabel 4.15	Perhitungan Biaya Tidak Langsung Produk Kredit Modal Kerja	67
Tabel 4.16	Data Biaya <i>Overhead</i> per Produk Kredit	68
Tabel 4.17	Data Aktiva Produktif Tahun 2009.....	68
Tabel 4.18	Perhitungan Alokasi Biaya <i>Overhead</i> per Produk.....	68
Tabel 4.19	Perhitungan <i>Cost of Loanable Fund</i>	69
Tabel 4.20	Perhitungan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif.....	70
Tabel 4.21	Perhitungan Cadangan Risiko Kredit Macet.....	70
Tabel 4.22	Alokasi Biaya <i>Overhead</i> Terhadap Suku Bunga Kredit	71

Tabel 4.23	Perhitungan Suku Bunga Kredit Hasil ABC	72
Tabel 4.24	Perbandingan Suku Bunga Kredit ABC dan Tradisional.....	72
Tabel 4.25	Laporan Laba Rugi PT BPR XYZ Tahun 2009	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	37
Gambar 4.1	Struktur Organisasi PT BPR XYZ	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Keuangan PT BPR XYZ Tahun 2009..... 81

LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Priyambudi Sujiwo Pratomo

NIM : 200612060

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan tata tertib STIE IBS.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar.

Penulis,

(Priyambudi Sujiwo Pratomo)

ABSTRACT

In performing the intermediary function, bank engaged in fund raising and lending activities. Fund mobilization and lending activities by banks closely tied to interest rate, such as deposit interest rate and lending interest rate. Deposit interest rate is the yield for the storage of funds (depositors), while the lending rate is the bank of borrower's income funds (debtor). The process of setting interest rates is an essential process for banks, because the pricing errors can cause errors resulting in the decision making losses for banks. This study aimed to explore the possibilities of implementation of Activity Based Costing system in calculating the allocation of overhead costs to set interest rate loan product at PT BPR XYZ period in 2009.

The approach used in this study is a case study. The data collected by the primary data containing results of interviews and observations of PT BPR XYZ and secondary data from published financial statements of PT BPR XYZ period in 2009. Data collection methods used method of documentation, library research, and field studies.

Based on the analysis and discussion of the results obtained loan rate established by PT BPR XYZ at 30% for all loan products, while lending rates based on the calculation of overhead with Activity Based Costing system at 33.61% for consumer credit products and 31.55% for working capital loan products. If we compare traditional lending rate and ABC lending products, the research resulted in the difference 3.61% for consumer credit loan products and 1.55% for working capital loan products. The difference shows lending interest rates determined by PT BPR XYZ could not cover the entire cost of the bank, it can cause losses in 2009.

keywords: rural banks, lending rates, loan products, activity based costing

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perbankan memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa terdapat dua jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat atau biasa disingkat dengan BPR. Bank sebagai lembaga kepercayaan yang melaksanakan fungsi intermediasi antara pihak yang memiliki dana lebih (*surplus of fund*) dan pihak yang membutuhkan dana (*deficit of fund*), melakukan penghimpunan dana pihak berdana lebih dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, kemudian menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk penyaluran kredit. Terdapat perbedaan antara BPR dengan Bank Umum, yaitu BPR hanya melakukan penghimpunan dana hanya dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan, tidak dalam bentuk giro.

Bank menggunakan dana yang dihimpun dari masyarakat luas sebagai sumber dana utama bagi penyaluran kredit, dimana penyaluran kredit merupakan sumber pendapatan utama bank. Penghimpunan dana dari masyarakat luas dikatakan sebagai sumber dana utama bagi bank karena sumber dana ini relatif mudah untuk mencarinya, tersedia banyak di masyarakat dan juga persyaratan yang tidak sulit (Kasmir, 2002). Bentuk penghimpunan dana yang dilakukan bank antara lain dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Menurut

Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jenis penyaluran kredit yang umum disediakan oleh bank di Indonesia, antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumtif.

Menurut Siamat (2005), usaha bank terkonsentrasi dalam penyaluran kredit disebabkan beberapa alasan, (1) sifat usaha bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dan unit defisit, (2) penyaluran kredit memberikan *spread* yang pasti sehingga besarnya pendapatan dapat diperkirakan, (3) melihat posisinya dalam pelaksanaan kebijaksanaan moneter, perbankan merupakan sektor usaha yang kegiatannya paling diatur dan dibatasi. Di Indonesia misalnya, bank-bank tidak diperkenankan melakukan jual beli saham di bursa efek, dan (4) sumber dana utama bank berasal dari dana masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Proses penghimpunan dan penyaluran dana oleh bank terkait erat dengan suku bunga, baik suku bunga simpanan ataupun pinjaman. Suku bunga simpanan merupakan imbal hasil bagi penyimpan dana (deposan), sedangkan suku bunga pinjaman merupakan pendapatan bank dari peminjam dana (debitur). Kasmir (2002) berpendapat bahwa bunga simpanan dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang menyimpan dananya di bank, contoh jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito, sementara bunga pinjaman merupakan bunga yang dibebankan kepada para peminjam (debitur) atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank, contoh bunga kredit. Dalam menentukan besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman, bank

perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan dana, persaingan, kebijaksanaan pemerintah, target laba yang diinginkan, jangka waktu, kualitas jaminan, reputasi perusahaan, produk yang kompetitif, hubungan baik, dan jaminan pihak ketiga.

Terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan oleh bank dalam penentuan suku bunga kredit yang akan dibebankan kepada para debitur antara lain total biaya dana (*cost of fund*), laba yang diinginkan, cadangan risiko kredit macet, biaya *overhead*, dan pajak (Kasmir, 2002). Kelima unsur tersebut merupakan harga pokok dana untuk penentuan suku bunga kredit. Menurut Rasyid (1999), suku bunga kredit tidak hanya ditentukan oleh tingkat suku bunga tabungan dan deposito, tetapi juga ditentukan oleh kualitas aktiva produktif yang berhubungan dengan kolektibilitas kredit yang telah disalurkan oleh bank. Jadi bank perlu mempertimbangkan faktor dan unsur penentuan suku bunga simpanan dan pinjaman, pengelolaan aset dan kewajiban secara efektif dan efisien, serta menentukan metode penentuan suku bunga kredit yang tepat sehingga mampu menghasilkan suku bunga kompetitif.

Suku bunga kredit yang kompetitif bermanfaat (1) memberikan keuntungan yang maksimal bagi bank, tanpa merugikan debitur, (2) meningkatkan loyalitas nasabah lama, dan (3) melakukan akuisisi debitur baru, karena mayoritas debitur baru menginginkan tingkat suku bunga kredit yang rendah. Di Indonesia, kredit perbankan cenderung makin dominan sebagai sumber pembiayaan domestik ketimbang obligasi dan saham. Dominasi bank yang semakin besar bisa berdampak buruk karena bank tidak terpacu menawarkan bunga kredit yang lebih kompetitif (Kompas, 23 Februari 2010).

Terdapat dua metode penentuan harga pokok sebuah produk, yaitu metode penentuan harga pokok tradisional dan metode penentuan harga pokok produksi yang berdasarkan

aktivitas atau dikenal dengan *Activity Based Costing* (ABC). Metode penentuan harga pokok tradisional merupakan metode yang mengalokasikan biaya tidak langsung dengan hanya menggunakan tarif tunggal biaya tidak langsung (Horngren dkk, 2009). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Sanjaya (2004) yang berpendapat keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional adalah adanya alokasi biaya tidak langsung hanya menggunakan tarif tunggal.

Salah satu contoh keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional terjadi dalam perusahaan *the Buckeye National Bank* (BNB). Perusahaan ini sebelum menerapkan ABC menggunakan sistem akuntansi biaya tradisional untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke dalam *Retail Line Customer* (RL) dan *Business Line Customer* (BL). Dalam pengalokasian tersebut, perusahaan menggunakan tarif tunggal, yaitu total *value check processed*. RT mendapatkan alokasi biaya sebesar \$285.000 dan BL \$2.565.000 dari total biaya tidak langsung \$2.850.000. Jika perusahaan menerapkan ABC, RL mendapat alokasi biaya tidak langsung sebesar \$1.672.500 dan BL \$1.117.500 dari total biaya tidak langsung sebesar \$2.850.000. Selisih antara sistem biaya tradisional dengan ABC adalah cukup besar. Ini merupakan salah satu kelemahan sistem biaya tradisional (Bamber dan Hughes II, 2001) dalam (Sanjaya, 2004). Berdasarkan contoh penelitian di atas, metode tradisional dianggap tidak lagi mampu mencerminkan aktivitas yang spesifik sehingga menghasilkan biaya produk yang tidak akurat yang dapat mengakibatkan timbulnya *overcosting* atau *undercosting*. Kesalahan penentuan suku bunga kredit dapat merugikan pihak bank dan juga nasabah/ debitur bank. Adanya kemungkinan kesalahan tersebut, maka perlu diterapkan sistem penentuan suku bunga kredit berdasarkan aktivitas atau *Activity Based Costing*.

ABC merupakan salah satu alternatif yang dapat dijadikan referensi oleh pengelola perusahaan untuk dapat mengidentifikasi berbagai biaya yang terserap pada produk

(Siswanto, 2004). Sistem ABC berusaha menelusur seluruh biaya yang terserap dalam pelaksanaan produksi sampai produk dapat dipasarkan. *Activity Based Costing* adalah merupakan metode penentuan harga pokok produksi akurat yang penetapan biaya produksi berdasarkan sumber daya yang dikonsumsi pada setiap aktivitas yang dilakukan dalam proses produksi suatu produk (Suprihatmi, 2003). Pendekatan ini menggunakan *cost driver* pada aktivitas yang menimbulkan biaya dan akan lebih akurat bila diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan beraneka ragam jenis produk serta sukar untuk mengidentifikasi biaya tersebut ke setiap produk secara individual.

Dalam menggunakan sistem ABC, bank perlu membedakan jenis biaya bagi bank, antara biaya langsung dengan biaya tidak langsung. Biaya-biaya yang termasuk biaya langsung bagi bank antara lain gaji pegawai (gaji pegawai kredit), transportasi dan pelatihan bagi pegawai kredit, provisi kerugian kredit dan beban bunga simpanan. Biaya tidak langsung bagi bank diantaranya biaya sewa, perlengkapan kantor, publikasi, transportasi pegawai *overhead*, biaya telepon dan pos, asuransi, perbaikan dan perawatan, biaya konsultan, hukum, dan audit, biaya bank, pajak dan depresiasi (Helms, 1998).

Pada beberapa penelitian sebelumnya, sistem ABC banyak diaplikasikan pada perusahaan manufaktur bukan pada perusahaan jasa. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul:

**”Penerapan Activity Based Costing pada Bank Perkreditan Rakyat dalam
Menentukan Suku Bunga Kredit yang Tepat ”**

1.2 Masalah Penelitian

1.2.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana metode penetapan suku bunga kredit pada PT BPR XYZ?
- b. Bagaimana cara perhitungan suku bunga kredit dengan alokasi biaya *overhead* menggunakan sistem *Activity Based Costing* pada PT BPR XYZ?
- c. Apakah penerapan sistem ABC dapat menghasilkan penetapan suku bunga kredit yang tepat bagi PT BPR XYZ?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Untuk memperoleh gambaran mengenai penetapan tingkat suku bunga kredit di bank perkreditan rakyat dengan menggunakan sistem ABC, penulis melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

- a. Data yang akan dikumpulkan dan dianalisis adalah data tahun 2009
- b. Lingkup biaya-biaya *overhead* pembentuk suku bunga kredit PT BPR XYZ
- c. Alokasi biaya *overhead* kepada suku bunga produk kredit PT BPR XYZ.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai penerapan sistem ABC ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Memahami metode penetapan suku bunga kredit pada PT BPR XYZ
- b. Mengetahui cara perhitungan suku bunga kredit dengan alokasi biaya *overhead* menggunakan sistem *Activity Based Costing* pada PT BPR XYZ
- c. Membandingkan suku bunga kredit yang ditetapkan PT BPR XYZ dengan suku bunga kredit berdasarkan perhitungan alokasi biaya *overhead* dengan sistem *Activity Based*

Costing untuk mengetahui kemampuan sistem ABC menghasilkan penetapan suku bunga kredit yang tepat bagi PT BPR XYZ.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai penetapan tingkat suku bunga kredit di bank mikro, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi bahan pemikiran bagi manajemen PT Bank XYZ serta praktisi yang bergerak di bidang jasa keuangan tentang penggunaan sistem ABC sebagai metode penentuan suku bunga kredit.

b. Bagi Akademik

Penelitian mengenai sistem ABC dapat menjadi sumbangan referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya penelitian mengenai penerapan metode ABC pada sektor perbankan.

c. Bagi Penulis

Penulis berharap dapat menambah wawasan mengenai pengaplikasian sistem ABC yang telah dipelajari di perkuliahan pada dunia nyata.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran berupa berbagai definisi, teori-teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Bab III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi pemilihan objek penelitian, data yang akan dihimpun, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai gambaran umum objek penelitian dan analisis serta pembahasan mengenai metode penentuan suku bunga kredit pada PT Bank XYZ dan perhitungan alokasi biaya *overhead* ke produk kredit PT BPR XYZ dengan menerapkan sistem ABC.

Bab V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait dengan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Bank

Menurut pengertian umum, bank adalah sebuah tempat untuk menyimpan dan meminjam uang yang dilindungi oleh Undang-Undang yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Muljono (1991), bank adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan tiga fungsi yaitu, (1) menerima penyimpanan dana masyarakat dari berbagai bentuk, (2) menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan baik dalam rangka mengembangkan usahanya maupun untuk kepentingan pribadi, (3) melaksanakan berbagai jasa yang diperlukan masyarakat dalam kegiatan perdagangan dan pembayaran Dalam Negeri maupun Luar Negeri, serta berbagai jenis jasa lainnya di bidang keuangan.

Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang bertindak sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana, yaitu menjalankan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana dari masyarakat luas dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998, jenis bank dapat dibedakan menjadi:

2.1.1 Bank Umum

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum antara lain:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Dan lain-lain sesuai dengan undang-undang.

2.1.2 Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998, bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank perkreditan rakyat antara lain:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;

- c. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Kegiatan usaha yang dilarang dilakukan oleh bank umum antara lain:

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali pedagang valuta asing (PVA);
- c. Melakukan penyertaan modal;
- d. Melakukan usaha perasuransian;
- e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah ditetapkan di atas.

Menurut Siamat (2005), fungsi BPR adalah untuk memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan, dan mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir. Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut dapat kita lihat bahwa keberadaan BPR ditujukan untuk masyarakat pedesaan dalam memperoleh bantuan modal usaha sehingga mampu menciptakan pemerataan pendapatan nasional.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Menurut Kasmir (2003), dalam bahasa latin kredit disebut "*credere*" yang artinya percaya. Pemberi kredit percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian, sedangkan bagi penerima kredit berarti telah menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan atau pemberian kepercayaan baik berupa uang, barang atau jasa oleh pemberi kredit (kreditur) kepada penerima kredit (debitur) atas dasar kesepakatan pinjam meminjam antara kedua belah pihak, yang mana pihak penerima kredit wajib untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.2.2 Unsur Kredit

Pemberian kredit terkait erat dengan kepercayaan pemberi kredit (kreditur) terhadap penerima kredit (debitur). Oleh karena itu dalam proses pemberian kredit, adanya proses analisis kredit yaitu untuk mendapatkan keyakinan bahwa calon debitur dapat dipercaya. Setelah memperoleh kepercayaan dari kreditur, debitur diwajibkan untuk melakukan pengembalian kredit sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan beserta bunga sebagai balas jasa. Menurut Kasmir (2003), unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka

waktu kredit. Kepercayaan diperoleh melalui suatu analisa secara mendalam terhadap kondisi nasabah.

b. Kesepakatan

Kesepakatan antara bank dan nasabah kredit dicapai dengan adanya suatu perjanjian/akad kredit.

c. Jangka Waktu

Kredit yang diberikan memiliki batas waktu pengembalian angsuran kredit yang telah disepakati oleh bank dan nasabah kredit.

d. Risiko

Risiko yang dapat timbul dari disalurkannya fasilitas kredit yaitu risiko tidak tertagihnya atau macet penyaluran suatu kredit.

e. Balas Jasa

Balas jasa yang diterima oleh bank konvensional berbentuk bunga serta biaya administrasi kredit.

2.2.3 Tujuan Kredit

Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan utama bank dalam memperoleh keuntungan. Selain itu, pemberian kredit dapat diibaratkan sebagai pengabdian bank kepada masyarakat dan pemerintah. Menurut Kasmir (2003), tujuan penyaluran kredit adalah sebagai berikut:

a. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan, yang diperoleh dalam bentuk bunga dan biaya administrasi.

b. Membantu usaha nasabah

Membantu usaha nasabah melalui dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja, sehingga debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu pemerintah

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank dapat meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil. Sehingga dapat membantu pemerintah dalam bentuk penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, peningkatan devisa negara.

2.2.4 Fungsi Kredit

Dunia usaha di Indonesia umumnya mengandalkan penyaluran kredit dari bank sebagai sumber permodalan perusahaannya. Hal tersebut menunjukkan pentingnya peran kredit bagi masyarakat. Menurut Suyatno dkk (2007), fungsi kredit adalah (1) meningkatkan daya guna uang, adanya kegiatan pemberian kredit, dana yang mengendap di bank dapat digunakan untuk disalurkan kepada debitur untuk menghasilkan barang atau jasa. Selain itu, bank juga memperoleh penghasilan tambahan, (2) meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, dimana uang yang disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya, (3) meningkatkan daya guna dan peredaran barang, kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi barang yang memiliki nilai guna, (4) meningkatkan kegairahan berusaha, maksudnya debitur yang memperoleh fasilitas kredit dapat termotivasi untuk memperbesar usahanya, (5) meningkatkan pemerataan pendapatan, jadi dengan

adanya penyaluran kredit dapat mengurangi pengangguran karena ekspansi usaha yang dilakukan debitur.

2.2.5 Jenis Kredit

Kasmir (2002) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa jenis kredit dilihat dari:

a. Segi Kegunaan

Jenis kredit dilihat dari segi kegunaan terdiri atas (1) kredit investasi, merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/ pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi; (2) kredit modal kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Segi Tujuan Kredit

Jenis kredit dilihat dari segi tujuan kredit terdiri atas (1) kredit produktif, merupakan kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, produksi atau investasi. Kredit ini juga diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa; (2) kredit konsumtif, merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. (3) kredit perdagangan, merupakan kredit yang diberikan kepada debitur yang berfungsi sebagai pemasok ataupun agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

c. Segi Jangka Waktu

Jenis kredit dilihat dari segi jangka waktu terdiri atas (1) kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang atau paling lama 1 tahun, biasanya berbentuk kredit modal kerja; (2) kredit jangka menengah, merupakan

kredit yang memiliki jangka waktu kredit berkisar antara 1 hingga 3 tahun, biasanya berbentuk kredit investasi; (3) kredit jangka panjang, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kredit diatas 3 tahun, biasanya berbentuk kredit investasi jangka panjang.

d. Segi Jaminan

Jenis kredit dilihat dari segi jaminan terdiri atas (1) kredit dengan jaminan, merupakan kredit yang mewajibkan debitur memberikan jaminan atas kredit yang diterimanya. Jaminan kredit dapat berbentuk benda berwujud, tidak berwujud atau jaminan orang; (2) kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur.

e. Segi Sektor Usaha

Jenis kredit dilihat dari segi sektor usaha terdiri atas (1) kredit pertanian, merupakan kredit yang disalurkan untuk membiayai sektor perkebunan atau pertanian, biasanya berjangka waktu pendek atau panjang; (2) kredit peternakan, merupakan kredit yang disalurkan untuk membiayai sektor peternakan, biasanya berjangka pendek atau panjang; (3) kredit industri, merupakan kredit yang disalurkan untuk membiayai sektor industri, baik industri kecil, menengah, atau besar; (4) kredit pertambangan, merupakan kredit yang disalurkan untuk membiayai usaha tambang, biasanya berjangka waktu panjang; (5) kredit pendidikan, merupakan kredit yang disalurkan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana pendidikan atau kredit kepada mahasiswa; (6) kredit profesi, merupakan kredit yang disalurkan kepada para kalangan profesional; (7) kredit perumahan, merupakan kredit yang disalurkan untuk

membiaya pembangunan atau pembelian perumahan, biasanya berjangka waktu panjang.

2.2.6 Penentuan Tingkat Suku Bunga Kredit (*Loan Pricing*)

Loan pricing merupakan proses penentuan tingkat suku bunga yang akan dibebankan kepada debitur. Suku bunga kredit itu sendiri merupakan harga yang harus dibayar debitur karena meminjam dana dari bank (Rasyid, 1999). Beberapa unsur yang perlu diperhatikan oleh bank dalam penentuan suku bunga kredit yang akan dibebankan kepada para debitur antara lain total biaya dana (*cost of fund*), laba yang diinginkan, cadangan risiko kredit macet, biaya *overhead*, dan pajak (Kasmir, 2002). Penjelasan mengenai unsur pembentuk suku bunga kredit sebagai berikut:

a. Biaya Bunga (*cost of fund*)

Bentuk penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank umum dapat berbentuk antara lain tabungan, giro, dan deposito. Namun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hanya melakukan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka, karena BPR dilarang untuk menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank dapat dihubungkan dengan biaya bunga yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah penyimpan dana (deposan). Menurut Kasmir (2003), bunga simpanan adalah harga beli yang harus dibayar bank kepada nasabah pemilik simpanan. Bunga ini diberikan sebagai balas jasa kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank.

Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) (2001) dijelaskan bahwa beban bunga adalah beban yang dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana. Biaya dana bank atau *cost of fund* adalah jumlah dana yang harus dibayarkan oleh bank kepada pihak yang telah menyimpan dananya di bank (Rasyid, 1999).

Menurut Bastian dan Suhardjono (2006), COF adalah seluruh biaya bunga yang dikeluarkan untuk mendapatkan dana dari masyarakat, ditambah biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan dana tersebut, seperti biaya promosi. *Cost of fund* (COF) dapat diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan bank atas dana yang dihimpun sebelum diperhitungkan besarnya ketentuan cadangan likuiditas wajib (Siamat, 2005). Jadi dapat disimpulkan bahwa *cost of fund* merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat sebelum diperhitungkan besarnya ketentuan cadangan likuiditas wajib.

Dalam PAPI 2001 dijelaskan bahwa biaya bunga diakui secara akrual dan dinilai sebesar jumlah yang menjadi kewajiban bank, termasuk biaya lain terkait kegiatan penghimpunan dana, seperti hadiah. Lapoliwa dan Kuswandi (2000) juga menjelaskan bahwa biaya bunga diakui secara *accrual basis*.

b. *Cost of Loanable Fund*

Menurut Siamat (2005), *cost of loanable fund* (COLF) adalah biaya dana setelah dikurangi ketentuan cadangan likuiditas wajib. Sejalan dengan pengertian dari Bastian dan Suhardjono (2006), COLF yaitu biaya dana yang harus dikeluarkan atas dana yang diperoleh, setelah diperhitungkan dengan *reserve requirement* yang

bersifat *idle* (tidak menghasilkan). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan perbedaan *Cost of Loanable Fund* dengan *Cost of fund* yaitu biaya yang benar-benar dikeluarkan bank dalam memperoleh dana dari masyarakat, karena telah dikurangi dengan ketentuan *reserve requirement*. Persamaan dari *Cost of Loanable Fund*:

$$\text{COLF} = \frac{\text{Cost of Fund}}{(1 - \text{Reserve Requirement})}$$

c. *Cost of Money*

Cost of Money (COM) merupakan penjumlahan total *Cost of Loanable Fund* dan biaya *overhead* (Siamat, 2005). Menurut Bastian dan Suhardjono (2006), *cost of money* adalah seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk penempatan dana dalam bentuk pinjaman. Dengan kata lain, COM merupakan penjumlah COLF dan biaya *overhead*. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *cost of money* (COM) merupakan penjumlahan total *Cost of Loanable Fund* dan biaya *overhead*. Rumus perhitungan *cost of money* adalah:

$$\text{COM} = \text{COLF} + \text{biaya overhead}$$

d. *Biaya Overhead*

Biaya overhead, merupakan biaya yang dibutuhkan untuk mendukung berjalannya transaksi dalam kegiatan operasional bank. Menurut Bastian dan Suhardjono (2006), pengertian dari biaya *overhead* adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh bank dalam rangka kegiatan operasional, baik digunakan untuk pengerahan dana masyarakat, proses penempatan dana, hingga pengembaliannya maupun kegiatan pemberian jasa bank.

Menurut PAPI 2001, pengertian biaya *overhead* atau administrasi umum adalah berbagai beban yang timbul untuk mendukung kegiatan operasional bank. Biaya *overhead* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank sehubungan dengan aktivitas operasinya di luar biaya dana (Rasyid, 1999).

Menurut Lapoliwa dan Kuswandi (2000), terdapat beberapa ciri dari biaya *overhead* yang terjadi di bank sebagai berikut:

- 1) Tidak dapat diidentifikasi secara langsung dengan jasa yang dihasilkan, karena biaya yang dikeluarkan diperuntukan kegiatan bank,
- 2) Menjadi beban pada periode terjadinya, karena tidak ada biaya *overhead* untuk beberapa periode.
- 3) Biaya *overhead* yang dikeluarkan tidak memberikan manfaat untuk masa yang akan datang.

Berdasarkan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (2010), beban administrasi dan umum antara lain terdiri atas:

- 1) Beban tenaga kerja
Gaji, upah, honorarium, dan imbalan kerja lainnya.
- 2) Beban pendidikan
Biaya yang berkaitan dengan pendidikan yang diikuti oleh pengurus/ pegawai baik yang diselenggarakan oleh pihak ketiga maupun intern BPR termasuk kursus dan seminar serta biaya perjalanan dan akomodasi yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tersebut.
- 3) Beban sewa antara lain sewa kantor, alat-alat dan perabot.

4) Penyusutan/penghapusan atas aset tetap dan inventaris serta amortisasi atas aset tidak berwujud.

5) Premi asuransi

Premi asuransi adalah premi asuransi yang dibayarkan untuk keperluan pertanggungan atas beban BPR, misalnya asuransi aset tetap dan inventaris.

6) Biaya barang/jasa

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh BPR sehubungan dengan penerimaan/pemakaian barang-barang/jasa-jasa antara lain biaya konsultan, biaya listrik, air, telepon, pemeliharaan dan perbaikan atas aset tetap dan inventaris milik BPR, telegram, alat-alat tulis menulis, biaya percetakan, koran dan majalah.

7) Pajak-pajak.

e. Cadangan risiko kredit macet

Pencadangan aktiva produktif terhadap risiko kredit macet perlu dilakukan oleh bank, karena mengacu pada prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Bank Indonesia bagi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dalam melakukan pencadangan aktiva produktif, bank harus mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai perhitungan cadangan aktiva produktif.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat, kualitas aktiva produktif dalam bentuk kredit ditetapkan dalam empat golongan yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. BPR wajib

membentuk PPAP Umum dan Khusus dengan tarif perhitungan cadangan dari keempat golongan kolektibilitas aktiva produktif tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) 0,5% dari aktiva produktif yang memiliki kualitas Lancar, tidak termasuk Surat Berharga Indonesia;
- 2) 10% dari aktiva produktif yang memiliki kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan tiap debitur.
- 3) 50% dari dari aktiva produktif yang memiliki kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan tiap debitur.
- 4) 100% dari dari aktiva produktif yang memiliki kualitas Macet setelah dikurangi nilai agunan tiap debitur.

f. Laba yang diinginkan

Laba yang diinginkan merupakan laba atau keuntungan yang ingin diperoleh bank dan biasanya dalam persentase tertentu. Penentuan besar kecilnya laba bergantung pada kondisi pesaing, kondisi nasabah (nasabah utama atau tidak), dan juga sektor yang akan dibiayai (program pemerintah untuk pengusaha kecil atau komersil) (Kasmir, 2003). Menurut Bastian dan Suhardjono (2006), *spread* merupakan gambaran dari keuntungan yang ingin diperoleh dalam penyaluran pinjaman yang dikelola selama satu periode akuntansi.

g. Pajak

Pajak yaitu pajak yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya (Kasmir, 2003). Penentuan besar kecilnya pembebanan pajak bergantung pada kebijakan bank dalam menghadapi persaingan, bank dapat membebankan pajak secara penuh ataupun sebagian kepada debitur.

2.3 Biaya

Menurut Lapoliwa dan Kuswandi (2000), biaya merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam rangka menciptakan atau memperoleh pendapatan. Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) (2001), beban (*expense*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Hornrgren dkk (2009) mendefinisikan biaya sebagai sumber daya yang dikorbankan atau dihilangkan untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya biasa diukur dalam satuan nilai moneter yang harus dibayar untuk memperoleh barang atau jasa. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa biaya adalah sumber daya yang dikorbankan dalam bentuk pengeluaran bagi perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh tujuan tertentu.

Hornrgren dkk (2009) berpendapat jenis biaya dapat diklasifikasikan atas dasar:

a. Perilaku

Berdasarkan perilaku biaya dapat dibedakan menjadi (1) biaya tetap, merupakan biaya yang berhubungan dengan produk, yang tetap untuk sejumlah unit. Maksudnya, biaya tetap sama berapapun jumlah unit tersebut diproduksi dan dijual; (2) biaya variabel, menunjukkan biaya pengeluaran oleh perusahaan yang akan berubah sesuai dengan tingkat kegiatan bisnis perusahaan.

b. Cara Penelusuran

Berdasarkan cara penelusuran, biaya dapat dibedakan menjadi (1) biaya langsung, merupakan biaya yang langsung terkait dengan produksi dan perubahan tingkat penjualan; (2) biaya tidak langsung, merupakan biaya yang bertalian dengan

pengadaan pengeluaran untuk menyelenggarakan atau mendukung penelitian atau kegiatan-kegiatan-kegiatan lain dengan pendanaan luar tetapi tidak terkait langsung dengan suatu proyek spesifik.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank akan mengeluarkan biaya-biaya dalam menunjang kegiatan operasionalnya, termasuk membayar biaya bunga simpanan kepada masyarakat penyimpan dana (deposan). Pengakuan beban terjadi bersamaan dengan kenaikan kewajiban dan penurunan aktiva. Menurut Lapoliwa dan Kuswandi (2000), biaya diakui secara *accrual basis*, yaitu selalu diakui dan dibebankan ke dalam perhitungan laba-rugi pada saat jatuh waktu tanpa terlebih dahulu menunggu pembayaran. Berdasarkan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (2010) biaya bagi BPR terdiri atas biaya operasional dan biaya non operasional antara lain:

a. Biaya Operasional

yaitu semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan yang lazim sebagai usaha BPR.

Bentuk biaya operasional, diantaranya:

1) Biaya Bunga

Telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

2) Biaya *Overhead*

Telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

3) Biaya Penyisihan Kerugian

4) Biaya Pemasaran, termasuk pemberian hadiah yang tidak dapat diatribusikan, iklan dalam rangka promosi, dan biaya transaksi atas kredit yang tidak disetujui.

5) Biaya Penelitian dan Pengembangan, yaitu biaya yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh BPR.

6) Biaya Operasional Lainnya adalah biaya operasional yang tidak termasuk dalam salah satu biaya operasional di atas.

b. Biaya Non Operasional

yaitu semua beban yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR. Beban non operasional antara lain adalah:

- 1) Kerugian yang timbul sebagai akibat dijual/hilangnya aset tetap dan inventaris milik BPR.
- 2) Denda/sanksi karena suatu pelanggaran.

2.4 Activity Based Costing (ABC)

Menurut Glad dan Becker (1995), *activity based costing is a methodology that measures the cost and performance of activities, resource, and cost object. Resources are assigned to activities, then activities are assigned to cost object based on the use or consumption of the relevant activities. Activity-based costing recognizes the causal relationship of cost drivers to activities.* Menurut Suprihatmi (2003), ABC adalah metode penentuan harga pokok produksi (*product costing*) dengan mengukur secara cermat konsumsi sumber daya dalam setiap aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk/jasa. ABC menyediakan informasi tentang aktivitas-aktivitas dan sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut.

Menurut Horgren dkk (2009), *activity based costing is an approach to costing that focuses on individual activities as the fundamental cost object. It uses the costs of these activities as the basis for assigning cost to other cost objects such as products or services.*

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *activity based*

costing adalah suatu pendekatan perhitungan biaya barang atau jasa yang berfokus pada konsumsi sumber daya dalam aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan sistem ABC (Cooper dan Kaplan, 1991) dalam (Sudaryati, 1993) antara lain:

1. Memperbaiki kualitas pengambilan keputusan;

Perusahaan yang menerapkan sistem ABC akan memperoleh informasi biaya produk yang akurat, sehingga manajer dapat melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik.

2. Perbaiki terus-menerus terhadap aktivitas untuk mengurangi biaya *overhead*;

Sistem ABC mengidentifikasi biaya *overhead* dengan aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk. Pengimplementasian sistem ABC dapat memberikan informasi biaya *overhead* yang lebih akurat, sehingga perusahaan mampu melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap aktivitas yang tidak bernilai tambah.

3. Memberikan kemudahan dalam penentuan biaya relevan.

Metode tradisional memerlukan studi khusus untuk memperoleh biaya relevan. Namun sistem ABC mampu memberikan informasi biaya yang relevan, karena sistem ini dapat meningkatkan keakuratan biaya produk dan melaporkan biaya-biaya secara terpisah berdasarkan 4 kategori aktivitas yang berbeda.

Keterbatasan yang harus diperhatikan dari penerapan sistem ABC antara lain (Yulifah, 2000):

1. Sistem ABC memerlukan biaya yang mahal, sehingga perusahaan yang akan menerapkan sistem ini perlu mempertimbangkan biaya dan manfaatnya (*cost and benefit*);

2. Sistem ABC diperlukan oleh perusahaan yang memiliki diversifikasi produk yang tinggi, jika perusahaan hanya menghasilkan produk tunggal, penggunaan sistem ini tidak efisien, karena semua biaya yang terkait dengan produk merupakan biaya langsung.

2.4.1 Cost Driver

Menurut Glad dan Becker (1995), *cost driver can defined as those factors or transactions that are significant determinant of cost*. Menurut Horngren dkk (2009), *cost driver is a variable, such as the level of activity or volume, that causally affects cost over a given time span*. Pengertian pemicu biaya adalah aktivitas yang menyebabkan suatu biaya dikeluarkan (Suprihatmi, 2003).

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan pemicu biaya (*cost driver*) adalah faktor-faktor (dapat berupa aktivitas ataupun volume) yang menyebabkan timbulnya biaya, biasanya bersifat tidak tetap. Pemicu biaya menimbulkan hubungan kausal antara faktor pemicu biaya dengan biaya, jadi apabila faktor pemicu biaya meningkat maka biaya akan meningkat secara proporsional. Sistem ABC menggunakan *cost driver* yang lebih banyak daripada sistem penentuan biaya tradisional.

2.4.2 Pembebanan Biaya *Overhead* dengan Sistem ABC

Menurut Horngren (2009) pembebanan biaya *overhead* dengan sistem ABC melalui tujuh langkah penerapan sebagai berikut:

- a. Langkah 1 : Mengidentifikasi produk yang menjadi objek biaya;
- b. Langkah 2 : Mengidentifikasi biaya langsung dari produk;
- c. Langkah 3 : Memilih dasar alokasi biaya untuk mengalokasikan biaya tidak langsung;

- d. Langkah 4 : Mengidentifikasi biaya tidak langsung dihubungkan dengan masing-masing dasar alokasi biaya;
- e. Langkah 5 : Menghitung tarif per unit dari masing-masing dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk;
- f. Langkah 6 : Menghitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke produk;
- g. Langkah 7 : Menghitung total biaya produk dengan menjumlahkan seluruh biaya langsung dan biaya tidak langsung kepada produk.

2.4.3 ABC pada Bank

Penerapan sistem ABC pada perusahaan manufaktur dan jasa/perbankan sedikit berbeda tapi pada hakekatnya sama. Pada waktu menganalisis beban dalam perusahaan manufaktur, permintaan terhadap sumber daya penunjang timbul dari volume dan ragam produk, sedangkan perusahaan jasa seperti bank, beban dipicu secara alami oleh produk-produk tertentu seperti giro, rekening deposito, pinjaman komersial, hipotek rumah, dan sebagainya. Horngren (2009) mengungkapkan penerapan sistem ABC pada perusahaan jasa dan perdagangan sama dengan penerapan sistem ABC di perusahaan manufaktur.

Ilustrasi mengenai penerapan sistem ABC pada bank dapat dilihat pada tabel 2.1 s.d 2.6 (Bamber dan Hughes II, 2001).

Tabel 2.1
Data Biaya Tidak Langsung Buckeye National Bank

Biaya Tidak Langsung	Biaya Tidak Langsung termasuk Cost Pool Aktivitas	Estimasi Total Biaya Tahunan
Gaji karyawan pemrosesan cek	Pembayaran cek	\$700
Penyusutan peralatan dan fasilitas yang digunakan dalam pemrosesan cek	Pembayaran cek	\$440
Gaji teller	Penyediaan jasa teller	\$1,000
Penyusutan peralatan dan fasilitas yang digunakan dalam operasi teller	Penyediaan jasa teller	\$200
Gaji karyawan pada <i>call center</i>	Merespon pertanyaan rekening nasabah	\$450
Biaya sambungan telepon termasuk penyusutan peralatan dan fasilitas yang digunakan dalam <i>call center</i> nasabah	Merespon pertanyaan rekening nasabah	\$60
Total Biaya Tidak Langsung		\$2,850

Sumber: Penelitian Bamber dan Hughes II

Bamber dan Hughes II (2001) melakukan perhitungan terhadap biaya tidak langsung dengan dua metode, yaitu metode perhitungan biaya secara tradisional dan metode *Activity Based Costing* (ABC). Apabila biaya tidak langsung dihitung dengan metode perhitungan biaya secara tradisional dapat dilihat pada ilustrasi berikut.

Metode perhitungan biaya secara tradisional dilakukan dengan menggunakan tarif tunggal untuk pengalokasian biaya tidak langsung. Perincian perhitungan metode tradisional sebagai berikut:

- Perhitungan tarif alokasi biaya tidak langsung:

$$\frac{\text{total biaya tidak langsung}}{\text{total nilai cek yang diproses}} = \frac{\$2850}{\$95000} = \$0.03 \text{ per dollar yang diproses}$$

Tarif alokasi biaya tidak langsung tersebut digunakan untuk menghitung total biaya tidak langsung pada lini nasabah retail dan lini nasabah bisnis. Perhitungan total biaya tidak langsung pada lini nasabah retail dan lini nasabah bisnis dituangkan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Data Alokasi Biaya Tidak Langsung Metode Tradisional

	Lini Retail	Lini Bisnis	Total
Jumlah nilai cek yang diproses	\$9,500	\$85,500	\$95,000
Biaya per pemrosesan	*0.03	*0.03	*0.03
Total Biaya Tidak Langsung	\$285	\$2,565	\$2,850

Sumber: Penelitian Bamber dan Hughes II

Bamber dan Hughes II (2001) juga melakukan perhitungan biaya dengan sistem ABC. Metode perhitungan biaya dengan sistem ABC dilakukan dengan mengaplikasikan langkah-langkah sebagai berikut:

- Langkah 1:

Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi aktivitas.

Dalam Buckeye National Bank, peneliti mengidentifikasi tiga aktivitas yaitu:

1. Pembayaran cek
2. Penyediaan jasa teller.
3. Merespon pertanyaan rekening nasabah.

- Langkah 2:

Langkah kedua adalah mengestimasi biaya agregat atau pool biaya, dihubungkan pada masing-masing aktivitas. Peneliti menggunakan analisa aktivitas untuk mengidentifikasi biaya karyawan, peralatan, dan biaya lain dari masing-masing aktivitas:

1. Pembayaran cek: $\$700 + \$440 = \$1140$
2. Penyediaan jasa teller: $\$1000 + \$200 = \$1200$
3. Merespon pertanyaan rekening nasabah: $\$450 + \$60 = \$510$

- Langkah 3 dan 4:

Langkah ketiga adalah mengidentifikasi *cost driver* dari masing-masing aktivitas yang akan menghubungkan biaya aktivitas dengan nasabah yang menggunakan aktivitas tersebut. Langkah keempat adalah mengestimasi total kuantitas dari masing-masing *cost driver*. Peneliti mengidentifikasi *cost driver* dan estimasi kuantitas dari *cost driver* sebagai berikut:

Tabel 2.3
Data Aktivitas dan *Cost Driver*

Aktivitas	<i>Cost Driver</i>	Total unit <i>Cost Driver</i>
Pembayaran cek	Cek yang diproses	2850
Penyediaan jasa teller	Transaksi teller	200
Merespon pertanyaan rekening nasabah	Panggilan pertanyaan rekening kepada <i>customer service call center</i>	100

Sumber: Penelitian Bamber dan Hughes II

- Langkah 5:

Langkah kelima adalah memperhitungkan tarif alokasi biaya tidak langsung pada masing-masing aktivitas.

$$1. \text{ Pembayaran cek: } \frac{\$700 + \$440}{\$2850} = \frac{\$1140}{\$2850} = \$0.4 \text{ per cek yang diproses}$$

$$2. \text{ Penyediaan jasa teller: } \frac{\$1000 + \$200}{\$2850} = \frac{\$1200}{\$2850} = \$6 \text{ per transaksi teller}$$

- Merespon pertanyaan rekening nasabah:

$$\frac{\$450 + \$60}{\$2850} = \frac{\$510}{\$2850} = \$5.1 \text{ per panggilan pertanyaan rekening}$$

- Langkah 6:

Langkah keenam adalah memperoleh kuantitas *cost driver* aktual untuk mengestimasi keperluan sumber daya dari masing-masing objek biaya. Objek biaya dari penelitian ini adalah lini nasabah retail dan lini nasabah bisnis.

Tabel 2.4

Data Cost Driver pada Lini Nasabah

<i>Cost Driver</i>	Jumlah unit <i>cost driver</i> yang digunakan untuk lini nasabah retail	Jumlah unit <i>cost driver</i> yang digunakan untuk lini nasabah bisnis	Total Unit <i>Cost Driver</i>
Pembayaran cek	570	2280	2850
Penyediaan jasa teller	160	40	200
Merespon pertanyaan rekening nasabah	95	5	100

Sumber: Penelitian Bamber dan Hughes II

- Langkah 7:

Langkah ketujuh adalah mengalokasikan biaya dari masing-masing aktivitas ke objek biaya, yaitu dengan mengalikan tarif biaya tidak langsung dengan jumlah unit *cost driver*.

Tabel 2.5

Data Alokasi Biaya Tidak Langsung Metode ABC

Aktivitas	Total Biaya Tidak Langsung Lini Nasabah Retail	Total Biaya Tidak Langsung Lini Nasabah Bisnis
Pembayaran cek [\$0.4*(570;2280)]	\$228	\$912
Penyediaan jasa teller [\$6*(160;40)]	\$960	\$240
Merespon pertanyaan rekening nasabah [\$5.1*(95;5)]	\$484.50	\$25.50
Total Biaya Tidak Langsung	\$1,672.50	\$1,172.50

Sumber: Penelitian Bamber dan Hughes II

Berdasarkan perhitungan biaya dengan metode tradisional dan ABC, diperoleh perbedaan alokasi biaya tidak langsung pada lini nasabah retail dan lini nasabah bisnis yang tercermin pada tabel 2.6 di bawah ini.

Tabel 2.6
Hasil Penelitian Ilustrasi Metode Tradisional dan ABC

Metode Perhitungan Biaya	Biaya Tidak Langsung Lini Nasabah Retail	Biaya Tidak Langsung Lini Nasabah Bisnis
Metode Tradisional	\$285	\$2,565
Metode ABC	\$1,672.50	\$1,177.50
Selisih	\$1,387.50	\$1,387.50

Sumber: Penelitian Bamber dan Hughes II

Dari data di atas dapat terlihat bahwa terjadinya distorsi biaya yang dapat mengakibatkan kesalahan pengambilan keputusan oleh manajer. Data tersebut juga menunjukkan kelemahan dari metode tradisional dalam mencerminkan biaya produk yang akurat karena tidak mampu mencerminkan aktivitas yang spesifik.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai *activity based costing* dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7 Penelitian Terdahulu terkait ABC

No	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	I Putu Sugiarta Sanjaya	2004	Penerapan <i>Activity Based Costing</i> (ABC) pada Sektor Jasa	ABC sebagai suatu teknik akuntansi biaya akan menghasilkan perbaikan pada kelemahan sistem akuntansi biaya tradisional.

dilanjutkan

lanjutan tabel 2.7

2	Juaniva Sidharta dan Yessica	2008	Perbandingan Penerapan Metode Tradisional dengan Metode <i>Activity Based Costing</i> dalam Memperhitungkan Biaya Produksi pada Perusahaan XYZ	Terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam keakuratan hasil produksi antara metode tradisional dan metode <i>activity based costing</i> .
3	Abrar	1999	<i>Activity Based Costing System</i>	Sistem biaya tradisional dianggap tidak mampu lagi memberikan informasi biaya yang akurat. ABC lebih logis dan mampu menghasilkan informasi biaya yang akurat.
4	Erina Sudaryati	1993	ABC System: Perlakuan Baru dalam Membebaskan Biaya <i>Overhead</i> Pabrik	Sistem ABC membebaskan biaya <i>overhead</i> pabrik yang lebih teliti dan membentuk pusat biaya yang lebih banyak sehingga sumber daya yang dikonsumsi dapat ditelusuri dengan lebih baik. Akibatnya, manajemen dapat menghilangkan kegiatan-kegiatan yang tidak bernilai tambah.
5	Lilis Yulifah	2000	Penggunaan <i>Activity Based Costing</i> untuk Meningkatkan Keakuratan Perhitungan Biaya Produk	Sistem ABC lebih mampu menghasilkan informasi yang akurat daripada metode tradisional karena sistem ABC merupakan model konsumsi sumber daya dan menggunakan dasar alokasi biaya tidak hanya berdasarkan volume.
6	Davood Askarany dan Hassan Yazdifar	2007	<i>Why ABC is Not Widely Implemented?</i>	Masih banyak perusahaan di Australia yang enggan mengimplementasikan sistem ABC, dikarenakan kelebihan dan keunikan dari metode tradisional dibandingkan sistem ABC.
7	Jerry Weiner	1996	<i>Activity Based Costing for Financial Institutions</i>	ABC berhasil diterapkan di institusi keuangan, terutama area pemrosesan transaksi. Ini bisa menjadi alat yang berguna untuk mengukur sumber daya yang dikonsumsi dalam proses pemberian produk ke nasabah.
8	Linda Smith Bamber dan K.E Hughes II	2001	<i>Activity Based Costing in the Service Sector: The Buckeye National Bank</i>	Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil perhitungan biaya dengan metode tradisional dan metode ABC. Hal tersebut menunjukkan kelemahan metode tradisional dalam memberikan informasi biaya produk yang akurat.

lanjutan tabel 2.7

9	Fieda Femala	2007	Penerapan Metode <i>Activity Based Costing System</i> Dalam Menentukan Besarnya Tarif Jasa Rawat Inap (Studi Pada RSUD Kabupaten Batang)	Adanya perbedaan antara tarif jasa rawat inap dengan menggunakan metode tradisional dan metode ABC.
---	--------------	------	--	---

Sumber: Berbagai Sumber Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya (2004), sistem ABC dapat menjadi sistem penentuan harga pokok produksi yang mampu melakukan perbaikan pada kelemahan-kelemahan sistem akuntansi biaya tradisional. Sistem ABC mengasumsikan bahwa produk mengkonsumsi aktivitas-aktivitas dan aktivitas mengkonsumsi sumber daya *overhead*.

Penelitian lain mengenai ABC dilakukan oleh Sidharta dan Yessica (2008) yang mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam keakuratan hasil produksi antara metode tradisional dan metode *activity based costing*. Hal tersebut terlihat dari hasil penelitian yaitu adanya distorsi biaya berupa kekurangan biaya. Biaya yang seharusnya dikeluarkan adalah Rp 24.994,2,- namun perusahaan menghitung biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sarung stang sepeda hanya Rp 23.383,-. Maka perusahaan akan mengalami kerugian sebesar Rp 1.611,2,-. Dalam jangka pendek mungkin hal ini tidak akan terlihat terlalu berpengaruh terhadap profit perusahaan. Namun, dalam jangka panjang, kerugian yang dialami akan terasa cukup besar.

Askarany dan Yazdifar (2007) melakukan penelitian yang berjudul "*Why ABC is Not Widely Implemented?*". Dalam penelitian ini diungkapkan alasan dari perusahaan-perusahaan di Australia yang enggan mengimplementasikan sistem ABC, karena mereka menganggap metode tradisional memiliki kelebihan (1) kesederhanaan, (2) telah dipahami secara luas, (3) cukup memuaskan, (4) telah memenuhi kriteria performa dari sistem yang

ada, (5) lebih murah, (6) tetap dapat digunakan setelah jangka waktu yang lama, (7) memperoleh hasil maksimal dengan biaya yang minimum.

Femala (2007) melakukan perhitungan tarif jasa rawat inap pada RSUD Kabupaten Batang dengan menggunakan metode ABC, selanjutnya diperoleh perbedaan pada tarif kamar VIP, Utama I, Utama II, Kelas I, Kelas II, dan Kelas III. Hal tersebut terjadi karena pembebanan biaya *overhead* pada masing-masing produk. Pada metode tradisional pembebanan biaya *overhead* hanya dibebankan pada satu *cost driver* saja. Akibatnya cenderung terjadinya distorsi pada pembebanan biaya *overhead*. Sedangkan pada metode ABC, biaya *overhead* dibebankan pada banyak *cost driver*. Sehingga metode ABC telah mampu mengalokasikan biaya aktivitas ke setiap kamar secara tepat berdasarkan konsumsi masing-masing aktivitas.

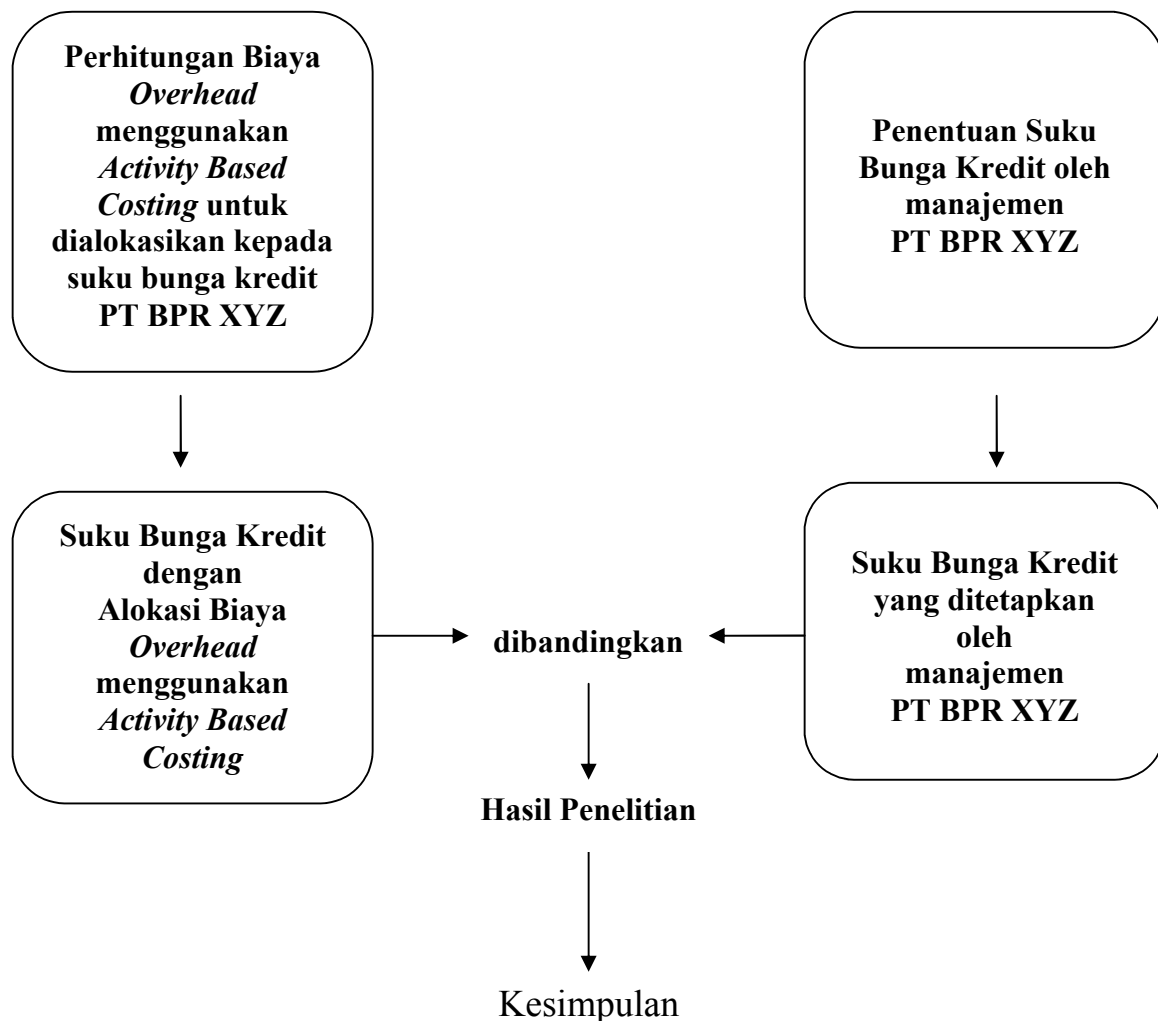
2.6 Kerangka Pemikiran

PT BPR XYZ merupakan bank yang menjalankan fungsi layaknya perbankan mikro lainnya, yaitu menghimpun dana dalam bentuk tabungan, deposito dan bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu, serta melakukan pemberian kredit. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PT BPR XYZ terkait erat dengan suku bunga, baik suku bunga simpanan sebagai imbal jasa bagi nasabah penyimpan dana (deposan) maupun suku bunga kredit sebagai pendapatan yang diterima oleh bank atas dana yang disalurkan kepada nasabah penerima kredit (debitur).

Pada penelitian ini, penulis memiliki pikiran untuk melakukan penelitian mengenai metode penentuan suku bunga kredit yang tepat bagi Bank Perkreditan Rakyat yaitu dengan cara mengetahui metode penentuan suku bunga kredit yang dilakukan oleh manajemen PT

BPR XYZ dan metode penentuan alokasi biaya *overhead* dengan menggunakan sistem ABC kepada suku bunga kredit PT BPR XYZ. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem ABC mampu memberikan pengalokasian biaya *overhead* yang lebih baik sehingga dapat menghasilkan suku bunga kredit yang tepat. Suku bunga kredit yang tepat adalah suku bunga kredit yang mampu menutupi seluruh biaya bank, namun tidak merugikan debitur karena terlalu mahal.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pemilihan Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah PT BPR XYZ merupakan salah satu bank perkreditan rakyat yang telah berdiri sejak tahun 1989, dengan lokasi kantor di Jl. HOS Cokroaminoto No.52, Kreo, Ciledug, Tangerang. Periode yang diambil untuk penelitian adalah periode tahun 2009 untuk memperoleh data mengenai biaya *overhead* pada PT BPR XYZ, sehingga peneliti mampu mengimplementasikan data tersebut ke dalam sistem ABC untuk menghasilkan suku bunga kredit yang tepat. Pemilihan PT BPR XYZ sebagai objek penelitian karena PT BPR XYZ merupakan salah satu bank perkreditan rakyat yang belum menerapkan sistem *activity based costing* sebagai metode penentuan harga suku bunga kredit untuk alokasi biaya *overhead* dan mengalami kerugian pada tahun 2009.

Penelitian mengenai penerapan sistem ABC (*Activity Based Costing*) pada Bank Perkreditan Rakyat dalam alokasi biaya *overhead* yang tepat ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu metode analisis dimana data yang dikumpulkan, disusun dan diinterpretasikan, serta di analisa, sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah. Menurut Sekaran (2006), studi deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya mengenai penerapan sistem ABC pada PT BPR XYZ.

Jenis metode deskriptif yang digunakan adalah pendekatan studi kasus, yaitu peneliti mencoba untuk melakukan penelitian yang rinci suatu objek selama kurun waktu tertentu, dengan cukup mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan dan kondisi masa lalunya.

3.2 Data yang akan Dihimpun

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Menurut Sekaran (2006), data primer merupakan data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Dalam penelitian ini data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pejabat PT BPR XYZ. Data yang dihimpun berupa data biaya *overhead*, struktur organisasi, produk simpanan dan penyaluran kredit, dan data lain terkait dengan penelitian.

2. Data Sekunder

Sekaran (2006) mengungkapkan bahwa data sekunder merupakan data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan publikasi PT. BPR XYZ pada tahun 2009 yang diunduh melalui situs www.bi.go.id.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Metode Kepustakaan

Metode pengumpulan data dan literatur yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, jurnal, peraturan-peraturan, internet serta sumber lain yang berkaitan dengan

masalah yang akan dibahas terkait dengan penelitian. Metode penelitian ini digunakan sebagai sumber landasan teoritis bagi penelitian, sehingga penulis memiliki landasan teoritis yang kuat untuk mengaplikasikan teori pada permasalahan yang sebenarnya.

2. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder sebagai pendukung data primer. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan publikasi PT BPR XYZ tahun 2009, untuk mendapatkan tambahan informasi mengenai biaya bagi bank.

3. Kajian Lapangan

Kajian lapangan yaitu pengumpulan data secara langsung pada bank yang menjadi objek penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam kajian lapangan ini antara lain:

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara penulis dengan pejabat PT BPR XYZ.
- b. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung pada PT BPR XYZ untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian.

3.4 Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis mencoba menerapkan teori mengenai sistem ABC guna menetapkan suku bunga kredit pada PT BPR XYZ. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data mengenai biaya *overhead* pada PT BPR XYZ. Peneliti mencoba menerapkan data terkait dengan penelitian yang telah dikumpulkan dari PT BPR XYZ pada sistem ABC, dengan lebih menekankan pada biaya *overhead* pembentuk suku bunga kredit

dan pengalokasian terhadap produk-produk kredit pada PT BPR XYZ. Langkah-langkah yang akan dilakukan penulis untuk menganalisis data penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian dengan melakukan wawancara, observasi, serta mengumpulkan data-data sekunder seperti laporan keuangan PT BPR XYZ.
2. Mengkaji hasil kajian lapangan dengan maksud dari penelitian, yaitu melakukan perhitungan alokasi biaya *overhead* dengan sistem ABC terhadap penetapan suku bunga kredit kepada masing-masing produk kredit PT BPR XYZ.
3. Melakukan perbandingan antara penetapan suku bunga kredit kepada masing-masing produk kredit yang ditetapkan PT BPR XYZ dengan suku bunga kredit berdasarkan perhitungan alokasi biaya *overhead* dengan sistem *Activity Based Costing*.
4. Hasil dari penelitian, selanjutnya dijadikan sebuah kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab pertanyaan dari penelitian.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

PT BPR XYZ didirikan pada tahun 1989 atas inisiasi Elias Lodewyk Lumban Tobing selaku pendiri dan direksi, yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat dengan membantu memenuhi kebutuhan mereka, dalam bentuk modal untuk usaha/modal kerja ataupun konsumsi rumah tangga. Beliau merupakan tokoh dalam dunia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berawal dari pendirian PT Eltora Karya Mandiri sebuah perusahaan yang memproduksi pakaian hangat dengan omzet Rp 5 milyar per tahun, sejak tahun 2000 ia telah membina 50 kavling industri kecil melalui perusahaan yang dibinanya. Beliau gusar dengan masih lemahnya UMKM di tanah air sebagai akibat kurang seriusnya perhatian pemerintah dan “mandul”nya peran Kadin Indonesia, ia pun mendirikan Kadin UKM pada 14 Juni 2001.

Pendirian PT BPR XYZ disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02-6073.HT.01041992. Pada awal berdirinya PT BPR XYZ bermodal awal Rp 50 juta terus berkembang hingga saat ini. PT BPR XYZ yang memiliki slogan “Mengutamakan Pelayanan Cepat dan Saling Menguntungkan”, berlokasi kantor di Jl. HOS Cokroaminoto No. 52, Kreo, Ciledug, Tangerang. Lokasi PT BPR XYZ yang berdomisili di dekat perbatasan antara propinsi Banten dan DKI Jakarta (khususnya daerah Jakarta Selatan) membuat PT BPR XYZ memiliki wilayah kerja meliputi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Persaingan yang dihadapi PT BPR XYZ cukup ketat

karena banyaknya jumlah bank perkreditan, serta lembaga keuangan lain yang menyediakan jasa pemberian kredit di wilayah Ciledug dan sekitarnya.

PT BPR XYZ berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan pada saat pendirian, yaitu:

Visi: Menjadi BPR yang terdepan dalam mensejahterakan masyarakat UKM dan masyarakat pada umumnya.

Misi: Mengoptimalkan pengupayaan dana deposito dan tabungan dengan bunga yang menarik sekaligus menyalurkan seluas-luasnya dalam bentuk kredit kepada masyarakat UMKM dan Dinas, dan usaha lain pada umumnya.

4.1.1 Pemegang Saham dan Pengurus PT BPR XYZ

Daftar pemegang saham beserta presentase kepemilikan PT BPR XYZ dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Daftar Pemegang Saham

Nama Pemegang Saham	Presentase Kepemilikan
DR. Elias L Tobing	52%
Ny. Ratna T Parapat	16%
Leonard Lolurapaja	16%
Ny. Emma Christdora	16%

Sumber: PT BPR XYZ

Dalam menjalankan kegiatan operasional BPR, para pemegang saham memberikan kepercayaan kepada pengurus PT BPR XYZ. Di bawah ini merupakan daftar pengurus PT BPR XYZ antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Budi Sutrisno

Komisaris : Wahyu Edi Kurnia

2. Dewan Direksi

Direktur Utama : DR. Elias Lodewyk Tobing

4.1.2 Produk PT BPR XYZ

PT BPR XYZ merupakan bank perkreditan rakyat yang juga menjalankan fungsi intermediasi yaitu melakukan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran bantuan kredit. Dalam menjalankan kegiatan penghimpunan dana masyarakat, PT BPR XYZ telah tergabung dalam bank yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jenis produk PT BPR XYZ yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dana antara lain:

1. Tabungan Masyarakat

Produk tabungan yang dimiliki oleh PT BPR XYZ telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sehingga nasabah memperoleh keamanan dalam melakukan penghimpunan dana di bank. PT BPR XYZ memberikan layanan antar jemput setoran tunai, serta memberikan suku bunga yang menarik dan kompetitif. Selain itu usaha penabung akan mendapat pendampingan dari PT BPR XYZ agar usahanya maju, serta penabung memperoleh kemudahan dalam memperoleh kredit.

2. Deposito

Produk deposito yang dimiliki oleh PT BPR XYZ juga telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sampai dengan 2 milyar sehingga nasabah memperoleh keamanan dalam melakukan penghimpunan dana di bank. PT BPR XYZ memberikan layanan antar jemput dalam hal penyetoran dan pencairan dana deposito, serta memberikan suku bunga yang menarik dan kompetitif.

Dana deposito yang dihimpun deposan dapat dijadikan sebagai jaminan kredit, apabila deposan juga bertindak sebagai debitur PT BPR XYZ. Pencairan atau bunga deposito dapat secara otomatis masuk ke tabungan atau di transfer ke tabungan deposan pada bank umum. Jangka waktu yang fleksibel yaitu antara 1-3 bulan, 6-12 bulan dan 24 bulan.

Selain melakukan kegiatan penghimpunan dana, PT BPR XYZ juga melakukan kegiatan penyaluran bantuan kredit, baik kredit untuk bantuan modal kerja/usaha ataupun konsumsi rumah tangga. Bagi debitur, PT BPR XYZ memberikan pilihan pembayaran yaitu pembayaran cicilan secara harian ataupun bulanan. Debitur dijamin perlindungan asuransi jiwa. Pada PT BPR XYZ terdapat 2 jenis produk kredit yaitu:

1. Kredit Modal Kerja

Produk kredit modal kerja yang dimiliki PT BPR XYZ diberikan untuk tujuan pengembangan usaha perorangan maupun usaha badan hukum (koperasi, CV, PT). Persyaratan yang diperlukan untuk pengajuan kredit modal kerja antara lain Fotocopy KTP suami istri, Kartu Keluarga, buku nikah; Pas foto (suami+istri) terbaru ukuran 4x6; SIUP atau Surat keterangan usaha dari kelurahan; dan menyerahkan agunan kredit (BPKB, Sertifikat AJB, Girik, dll)

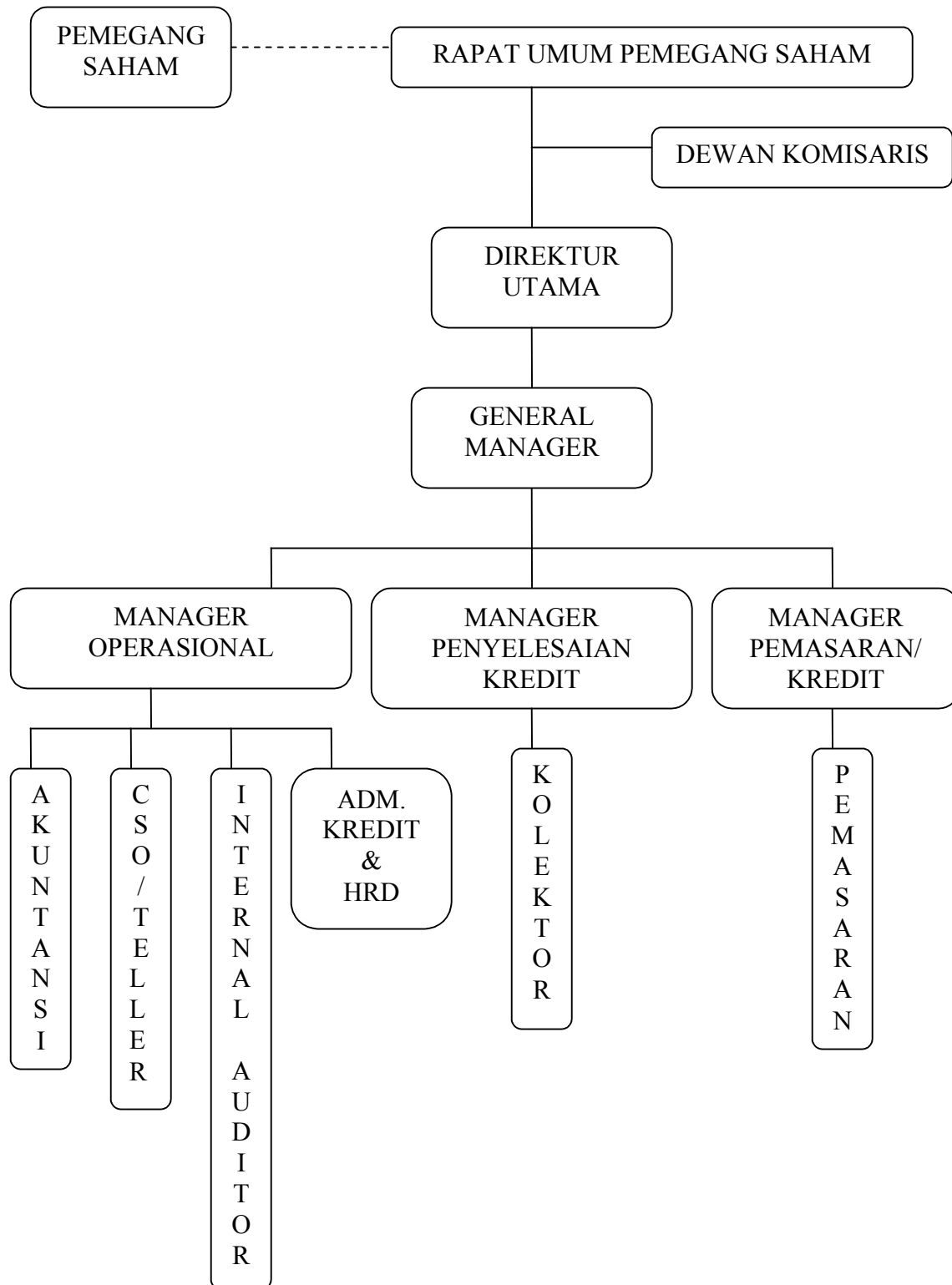
2. Kredit Konsumtif

Produk kredit konsumtif yang dimiliki PT BPR XYZ diberikan kepada karyawan pemerintah maupun swasta. Persyaratan yang diperlukan untuk pengajuan kredit modal kerja antara lain Fotocopy KTP suami istri, Kartu Keluarga, buku nikah; Pas foto (suami+istri) terbaru ukuran 4x6; Surat rekomendasi dari perusahaan tempat bekerja; Surat kuasa potong gaji; dan menyerahkan agunan kredit (BPKB, SK, Sertifikat AJB, Girik, dll)

4.1.3 Struktur Organisasi PT BPR XYZ

Secara umum, PT BPR XYZ telah memenuhi standar umum struktur organisasi BPR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu dalam struktur organisasi PT BPR XYZ terdapat seluruh elemen/jabatan penting antara lain Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, serta Kepala Bagian yang berhubungan secara langsung dengan kinerja BPR atau berinteraksi langsung dengan pegawai.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT BPR XYZ



Sumber: PT BPR XYZ

Di bawah ini merupakan perincian tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari tiap-tiap jabatan dalam struktural organisasi PT BPR XYZ, diantaranya:

1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas mengawasi kinerja operasional yang dilakukan oleh Direksi dan membuat Rancangan Kerja. Tanggung jawab dari dewan komisaris meliputi pemberian masukan dan arahan kepada Dewan Direksi, memberi contoh teladan, serta menjamin kinerja Direksi sesuai dengan rencana kerja dan ketetapan RUPS. Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban Direksi, bilamana terjadi penyimpangan kinerja operasional BPR dari rencana kerja dan menyetujui penghimpunan dana yang dilakukan oleh BPR.

2. Dewan Direksi

Tugas dari Dewan Direksi antara lain melakukan ketentuan Bank Indonesia, menaati peraturan perusahaan yang telah disepakati bersama Dewan Komisaris, memelihara hubungan baik dengan nasabah dan juga instansi-instansi yang memiliki hubungan kerja dengan BPR, melaksanakan Rencana Kerja, mengkoordinasikan kinerja seluruh unit jabatan di BPR, memberikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris dan instansi yang memiliki hubungan kerja dengan BPR, dan mengawasi penggunaan aset perusahaan. Dewan direksi bertanggung jawab memadukan seluruh SDM yang ada, menjamin terjalinnya komunikasi yang harmonis antar personal intern BPR, memberi contoh yang teladan, dan meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan. Dewan Direksi memiliki wewenang untuk menandatangani surat-surat penting perusahaan,

menetapkan suku bunga, menetapkan strategi perusahaan, memberikan penilaian atas prestasi pegawai, dan keputusan pembelian inventaris perusahaan.

3. *General Manager*

General Manager bertugas mengelola operasional BPR secara efektif dan efisien seoptimal mungkin mendayagunakan semua sumber daya yang dimiliki BPR; memberikan supervisi dan pengawasan melekat kepada unit kerja *marketing*, penyelesaian kredit/ kolektor, akuntansi, administrasi kredit, teller, dan umum personalia; memverifikasi dan mengesahkan nota transaksi keuangan sesuai dengan wewenangnya dan memeriksa bahwa nota-nota tersebut telah dibukukan dengan benar; monitoring pelaksanaan laporan BPR baik untuk intern maupun ekstern termasuk kepada Bank Indonesia; turut serta dalam Tim Pemutus Kredit bersama Direktur Utama, Direktur, dan Manager *Marketing* serta analisis kredit/petugas *marketing* selaku pengusul; memberikan supervisi dan pengawasan atas pengelolaan dokumen kredit antara lain dokumen surat permohonan kredit sampai dengan keputusan kredit, perjanjian kredit, dan bukti asli barang jaminan kredit, asuransi barang jaminan kredit, dan asuransi aset BPR; menandatangani surat tanda terima penerimaan agunan dari dan kepada nasabah. Jika GM berhalangan dapat dilakukan oleh manajer lain; menetapkan kolektibilitas kredit dengan mengacu pada ketentuan dari Bank Indonesia; melakukan *cash obname* dan diperiksa kecocokan jumlah fisik uang tunai dengan saldo uang tunai menurut pembukuan BPR pada akhir hari; berkoordinasi dengan unit kerja terkait menyusun Rencana Kerja Tahunan BPR; dan menyusun Laporan Keuangan Tahunan BPR. *General Manager* bertanggung jawab langsung kepada direksi.

4. *Manager Marketing* dan Penyelesaian Kredit

Manager Marketing dan Penyelesaian Kredit mengelola unit kerja *marketing* dan unit kerja penyelesaian kredit/kolektor; bekerja sama dengan *General Manager* memberikan supervisi dan pengawasan terhadap unit kerja *marketing* dan penyelesaian kredit; bertanggung jawab atas tercapainya target dana kredit dan target pencapaian *Non Performance Loan* yang ditetapkan dalam Rencana Kerja BPR atau target lainnya yang ditetapkan Direksi; memasarkan produk BPR baik dana maupun kredit; melakukan kunjungan ke nasabah untuk pembinaan atau penagihan/penyelesaian kredit dan juga untuk melihat kondisi fisik usaha nasabah dan agunan untuk bahan penilain kelayakan usaha, kelayakan agunan dan karakter nasabah; melakukan kunjungan dan memelihara hubungan baik dengan instansi pemerintah seperti RSCM, Pusdiknakes, BHP dll. untuk memasarkan kredit maupun tabungan dan deposito; melakukan langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah termasuk usul kepada Direksi untuk perubahan jadwal angsuran kredit, perubahan syarat-syarat kredit, perubahan struktur kredit, dan penghapusan buku debitur. *Manager Marketing* dan Penyelesaian Kredit bertanggung jawab langsung kepada direksi.

4.2 Perhitungan Alokasi Biaya Overhead terhadap Suku Bunga Kredit dengan ABC

Dalam penelitian ini, penulis mencoba melakukan perhitungan biaya produk dengan menggunakan sistem ABC. Metode ABC merupakan metode perhitungan biaya produk yang didasarkan pada pikiran bahwa pembentukan produk membutuhkan aktivitas dan aktivitas

mebutuhkan konsumsi sumber daya. Metode ABC memperhitungkan biaya dari setiap aktivitas dan mengalokasikan biaya ke objek biaya (produk).

Proses perhitungan alokasi biaya *overhead* terhadap suku bunga kredit pada PT BPR XYZ dengan menggunakan *Activity Based Costing*, penulis menggunakan langkah pengimplementasian yang dikemukakan oleh Horngren (2009) antara lain sebagai berikut:

- h. Langkah 1 : Mengidentifikasi produk yang menjadi objek biaya;
- i. Langkah 2 : Mengidentifikasi biaya langsung dari produk;
- j. Langkah 3 : Memilih dasar alokasi biaya untuk mengalokasikan biaya tidak langsung;
- k. Langkah 4 : Mengidentifikasi biaya tidak langsung dihubungkan dengan masing-masing dasar alokasi biaya;
- l. Langkah 5 : Menghitung tarif per unit dari masing-masing dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk;
- m. Langkah 6 : Menghitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke produk;
- n. Langkah 7 : Menghitung total biaya produk dengan menjumlahkan seluruh biaya langsung dan biaya tidak langsung kepada produk.

Data perincian biaya-biaya *overhead* yang terdapat pada PT BPR XYZ dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2
Realisasi Biaya Overhead PT BPR XYZ Tahun 2009

No	Beban	Rp.
1	Beban Personalia	Rp306,899,000.00
2	Beban Premi Asuransi	Rp10,130,123.00
3	Beban Pajak	Rp6,880,877.00
4	Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	Rp48,436,110.00
5	Beban Penyusutan Aktiva Tetap/Inventaris	Rp21,443,000.00
6	Beban Percetakan	Rp16,680,000.00
7	Beban Kendaraan dan Perjalanan	Rp49,074,100.00
8	Beban Kantor	Rp130,190,015.00
9	Beban Listrik, Telepon, dan Air	Rp110,210,775.00
10	Beban Lainnya	Rp50,927,000.00
Total Beban		Rp750,871,000.00

Sumber: PT BPR XYZ

Di bawah ini merupakan penjelasan dari beban/biaya yang terdapat pada PT BPR XYZ, antara lain:

a. **Beban Personalia**

Beban personalia merupakan beban pengeluaran berupa beban gaji, upah, dan honorarium, biaya pendidikan, dan biaya lain yang dibayarkan PT BPR XYZ kepada karyawan. Tabel 4.3 memaparkan rincian penghasilan per bulan dari masing-masing jabatan.

Tabel 4.3
Data Beban Personalia per Bulan

Jabatan	Penghasilan per bulan	Jumlah Pegawai
General Manager	Rp3,000,000.00	1
Manager Marketing dan Penyelesaian Kredit	Rp3,000,000.00	1
Marketing/Kolektor	Rp1,696,865.00	8
Adm.Kredit/Umum dan Personalia	Rp1,500,000.00	1
CSO/Teller	Rp1,500,000.00	1
Akuntansi	Rp1,500,000.00	1
Internal Auditor	Rp1,500,000.00	1

Sumber: PT BPR XYZ

b. Beban Premi Asuransi

Beban premi asuransi meliputi beban pengeluaran atas asuransi aktiva tetap dan inventaris PT BPR XYZ. Selain itu beban premi asuransi juga termasuk biaya asuransi dana yang terdapat dalam khasanah bank dan juga asuransi jiwa debitur.

c. Beban Pajak

Beban pajak meliputi beban pajak aset tetap milik PT BPR XYZ (Pajak Bumi dan Bangunan), pajak penghasilan pegawai.

d. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan

Beban pemeliharaan dan perbaikan terkait biaya pemeliharaan dan perbaikan atas aset tetap dan inventaris milik PT BPR XYZ, meliputi biaya perawatan dan kebersihan kantor.

e. Beban Penyusutan Aktiva Tetap/Inventaris

Beban penyusutan aktiva tetap/inventaris merupakan beban depresiasi atau penurunan nilai dari aktiva tetap/inventaris milik PT BPR XYZ.

f. Beban Percetakan

Beban percetakan meliputi beban percetakan formulir-formulir, slip-slip, brosur produk PT BPR XYZ.

g. Beban Kendaraan dan Perjalanan

Beban kendaraan dan perjalanan meliputi biaya bahan bakar kendaraan ataupun biaya perjalanan dinas pejabat atau karyawan terkait dengan operasional PT BPR XYZ.

h. Beban Kantor

Beban kantor meliputi biaya pembelian alat tulis kantor, inventaris, dan lain-lain.

i. Beban Listrik, Telepon, dan Air

Beban listrik, telepon, dan air meliputi biaya pengeluaran atas konsumsi daya listrik, jaringan telepon, dan air. Beban ini termasuk biaya komunikasi pejabat yaitu biaya pulsa telepon selular direksi.

j. Beban Lainnya

Beban lainnya merupakan biaya lain yang dikeluarkan untuk mendukung operasional PT BPR XYZ selain biaya yang telah disebutkan sebelumnya.

4.2.1 Mengidentifikasi Produk yang Menjadi Objek Biaya

Pada PT BPR XYZ, penulis menggunakan produk penyaluran fasilitas kredit yang dimiliki PT BPR XYZ yaitu Produk Kredit Konsumtif dan Produk Kredit Modal Kerja. Pada tahun 2009 data pengajuan kredit konsumtif dan kredit modal kerja di setiap bulan PT BPR XYZ dapat dilihat pada tabel 4.4 dan rekening kredit yang diterima 4.5 berikut.

Tabel 4.4
Data Pengajuan Kredit Tahun 2009

Bulan	Kredit Konsumtif	Kredit Modal Kerja
Januari	48	15
Februari	56	12
Maret	55	13
April	53	6
Mei	56	15
Juni	67	9
Juli	56	8
Agustus	42	10
September	54	7
Oktober	105	18
November	47	8
Desember	69	9
Total	708	130

Sumber: PT BPR XYZ

Tabel 4.5
Data Rekening Kredit Diterima Tahun 2009

Bulan	Kredit Konsumtif	Kredit Modal Kerja
Januari	43	15
Februari	56	12
Maret	55	11
April	53	6
Mei	45	10
Juni	67	9
Juli	56	5
Agustus	37	4
September	54	7
Oktober	98	12
November	47	8
Desember	62	7
Total	673	106

Sumber: PT BPR XYZ

Pada tahun 2009, PT BPR XYZ memberikan fasilitas penyaluran kredit kepada masyarakat dalam bentuk kredit konsumtif sebesar Rp1,703,323,000 dan kredit modal kerja sebesar Rp909,085,000. Perincian data nilai baki debet kredit PT BPR XYZ pada masing-masing produk kredit dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini.

Tabel 4.6
Data Baki Debet Kredit 2009

Produk Kredit	Nilai Baki Debet
Kredit Konsumtif	Rp1,703,323,000.00
Kredit Modal Kerja	Rp909,085,000.00
Total	Rp2,612,408,000.00

Sumber: PT BPR XYZ

4.2.2 Mengidentifikasi Biaya Langsung dari Produk

Penulis mengidentifikasi biaya langsung yang terkait dengan produk kredit yang dimiliki PT BPR XYZ adalah beban bunga. Beban bunga dianggap sebagai biaya langsung karena beban bunga terkait langsung dengan kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh PT BPR XYZ sebagai sumber dana untuk kegiatan penyaluran fasilitas kredit kepada masyarakat.

Pengimplementasian ABC pada bank sedikit berbeda dengan pengimplementasian ABC pada perusahaan manufaktur. Pengimplementasian ABC pada bank, biaya langsung tidak dapat dialokasikan secara langsung terhadap produk layaknya pengimplementasian ABC pada perusahaan manufaktur atau pabrik, karena pengalokasian beban bunga bank terhadap suku bunga kredit bank memiliki metode perhitungan tersendiri berdasarkan

besarnya suku bunga simpanan dan komposisi dana pada masing-masing produk simpanan bank.

4.2.3 Memilih Dasar Alokasi Biaya untuk Mengalokasikan Biaya Tidak Langsung

Dalam menerapkan metode perhitungan dengan ABC, penulis perlu mengidentifikasi aktivitas yang membentuk produk kredit sebagai objek biaya. PT BPR XYZ proses inti berupa aktivitas kredit dan aktivitas dana dan umum antara lain:

- a. Proses Inti Kredit, mencakup:
 - Pembukaan Kredit
 - Analisa Kredit
 - Administrasi Kredit
 - Pencairan Kredit
 - Penagihan Kredit
- b. Proses Inti Dana dan Umum, mencakup:
 - Dana
 - Akuntansi
 - Umum
 - Personalia
 - Internal Auditor

Berdasarkan penjelasan pejabat dan *job description* PT BPR XYZ, penulis mencoba melakukan estimasi alokasi jam kerja pada masing-masing jabatan terhadap aktivitas di atas. Alokasi jam kerja jabatan terhadap aktivitas dijelaskan pada tabel 4.7 sampai 4.9 berikut.

Tabel 4.7
Alokasi Jam Kerja Terhadap Aktivitas

Jabatan	Aktivitas									
	Kredit					Dana dan Umum				
	Pembukaan	Analisa	Administrasi	Pencairan	Penagihan	Akuntansi	Umum	Personalia	Internal Auditor	Dana
General Manager/Operasional		60%				10%		10%		20%
Manager Marketing dan Penyelesaian Kredit	10%	30%			50%					10%
Marketing/Kolektor	50%	10%			40%					10%
Adm.Kredit/ Umum dan Personalia			25%	25%			25%	25%		
CSO/Teller	30%			30%						40%
Akuntansi						100%				
Internal Auditor									100%	

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Tabel 4.8
Perhitungan Alokasi Beban Personalia terhadap Aktivitas Kredit

Jabatan	Kredit					Beban Personalia per Tahun	Jumlah Pegawai per Jabatan	Beban Personalia Aktivitas Kredit
	Pembukaan	Analisa	Administrasi	Pencairan	Penagihan			
General Manager/Operasional		60%				Rp36,000,000	1	Rp21,600,000
Manager Marketing dan Penyelesaian Kredit	10%	30%			50%	Rp36,000,000	1	Rp32,400,000
Marketing/Kolektor	40%	10%			40%	Rp20,362,380	8	Rp146,609,136
Adm.Kredit/Umum dan Personalia			25%	25%		Rp18,000,000	1	Rp9,000,000
CSO/Teller	30%			30%		Rp18,000,000	1	Rp10,800,000
Akuntansi						Rp18,000,000	1	Rp0
Internal Auditor						Rp18,000,000	1	Rp0
Total	Rp74,159,616	Rp48,689,904	Rp4,500,000	Rp9,900,000	Rp83,159,616			Rp220,409,136

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Tabel 4.9
Perhitungan Alokasi Beban Personalia terhadap Aktivitas Dana dan Umum

Jabatan	Dana dan Umum				Beban Personalia per Tahun	Jumlah Pegawai per Jabatan	Beban Personalia Aktivitas Kredit	
	Akuntansi	Umum	Personalia	Internal Auditor				Dana
General Manager/Operasional	10%		10%		20%	Rp36,000,000	1	Rp14,400,000
Manager Marketing dan Penyelesaian Kredit					10%	Rp36,000,000	1	Rp3,600,000
Marketing/Kolektor					10%	Rp20,362,380	8	Rp16,289,904
Adm.Kredit/Umum dan Personalia		25%	25%			Rp18,000,000	1	Rp9,000,000
CSO/Teller					40%	Rp18,000,000	1	Rp7,200,000
Akuntansi	100%					Rp18,000,000	1	Rp18,000,000
Internal Auditor				100%		Rp18,000,000	1	Rp18,000,000
Total	Rp21,600,000	Rp4,500,000	Rp8,100,000	Rp18,000,000	Rp34,289,904			Rp86,489,904

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Setelah tahapan pengidentifikasian aktivitas yang membentuk objek biaya, penulis melakukan pengelompokan beban (*cost pool*) yang didasarkan pada proporsi beban terhadap aktivitas. Tabel 4.10 menjelaskan rincian biaya per aktivitas

Tabel 4.10
Cost Pool per Aktivitas

No	Proses Inti	Aktivitas
1	Kredit	Pembukaan
		Beban Personalia Rp74,159,616
		Kendaraan dan Perjalanan Rp9,814,820
		Cost Pool Aktivitas
		Pembukaan Rp83,974,436
		Analisa
		Beban Personalia Rp48,689,904
		Kendaraan dan Perjalanan Rp9,814,820
		Cost Pool Aktivitas Analisa Rp58,504,724
		Administrasi
		Beban Personalia Rp4,500,000
		Kendaraan dan Perjalanan Rp9,814,820
		Cost Pool Aktivitas
		Administrasi Rp14,314,820
		Pencairan
		Beban Personalia Rp9,900,000
		Kendaraan dan Perjalanan Rp9,814,820
		Cost Pool Aktivitas Pencairan Rp19,714,820
Penagihan		
Beban Personalia Rp83,159,616		
Kendaraan dan Perjalanan Rp9,814,820		
Cost Pool Aktivitas Penagihan Rp92,974,436		

dilanjutkan

lanjutan tabel 4.10

2	Dana dan Umum	Akuntansi	
		Beban Personalia	Rp21,600,000
		Cost Pool Aktivitas Akuntansi	Rp21,600,000
		Umum	
		Beban Personalia	Rp4,500,000
		Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	Rp48,436,110
		Beban Penyusutan Aktiva	
		Tetap/Inventaris	Rp21,443,000
		Beban Pajak	Rp6,880,877
		Beban Kantor	Rp130,190,015
		Beban Listrik, Air dan Telepon	Rp110,210,775
		Beban Premi Asuransi	Rp10,130,123
		Beban Percetakan	Rp16,680,000
		Beban Lainnya	Rp50,927,000
		Cost Pool Aktivitas Umum	Rp399,397,900
		Personalia	
		Beban Personalia	Rp8,100,000
		Cost Pool Aktivitas Personalia	Rp8,100,000
		Internal Auditor	
Beban Personalia	Rp18,000,000		
Cost Pool Aktivitas Internal Auditor	Rp18,000,000		
Dana			
Beban Personalia	Rp34,289,904		
Cost Pool Aktivitas Dana	Rp34,289,904		

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Pemilihan dasar alokasi biaya didasarkan pada ketersediaan data yang dapat diandalkan dan data yang dapat diukur. Berdasarkan ketersediaan data mengenai data dasar alokasi biaya yang terdapat pada PT BPR XYZ, penulis memilih jumlah jam kerja dalam setahun sebagai dasar alokasi biaya bagi masing-masing aktivitas pembentuk objek biaya. PT BPR XYZ menjalankan peraturan Pasal 77 ayat 2 pada UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa untuk perusahaan yang memiliki waktu kerja 5 hari

dalam satu minggu ketentuan jam kerjanya adalah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Perincian dasar alokasi biaya bagi masing-masing aktivitas dijelaskan pada tabel 4.11 berikut.

Tabel 4.11 Dasar Alokasi Biaya per Aktivitas

No	Proses Inti	Aktivitas	Biaya Tidak Langsung	Dasar Alokasi Biaya	Kuantitas Dasar Alokasi Biaya
1	Kredit	Pembukaan	Rp83,974,436	jumlah pengajuan kredit	838
		Analisa	Rp58,504,724	jumlah pengajuan kredit	838
		Administrasi	Rp14,314,820	jumlah pengajuan kredit	838
		Pencairan	Rp19,714,820	jumlah rekening kredit	779
		Penagihan	Rp92,974,436	jumlah rekening kredit	779
2	Dana dan Umum	Akuntansi	Rp21,600,000	jam kerja	30600
		Umum	Rp399,397,900	proporsi per produk	
		Personalia	Rp8,100,000	jam kerja	30600
		Internal Auditor	Rp18,000,000	jam kerja	30600
		Dana	Rp34,289,904	jam kerja	30600

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Data total kuantitas dasar alokasi biaya diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Jam kerja} = 170^* \times 12^{**} \times 15^{***}$$

170* merupakan jumlah jam kerja dalam 1 bulan beserta jam kerja tambahan (lembur)

12** merupakan jumlah bulan dalam 1 tahun

15** merupakan jumlah keseluruhan pegawai PT BPR XYZ

4.2.4 Mengalokasikan Dasar Alokasi Biaya ke Objek Biaya

Pada tahapan pengidentifikasian biaya tidak langsung kepada masing-masing dasar alokasi biaya, penulis melakukan alokasi dasar alokasi biaya ke masing-masing produk kredit. Tabel 4.12 menjelaskan rincian alokasi dasar alokasi biaya pada masing-masing produk.

Tabel 4.12
Alokasi Dasar Alokasi Biaya per Objek Biaya

No	Aktivitas	Dasar Alokasi Biaya	Dasar Alokasi Biaya Produk Kredit Konsumtif	Dasar Alokasi Biaya Produk Kredit Modal Kerja	Kuantitas Dasar Alokasi Biaya
1	Pembukaan	jumlah pengajuan kredit	708	130	838
	Analisa	jumlah pengajuan kredit	708	130	838
	Administrasi	jumlah pengajuan kredit	708	130	838
	Pencairan	jumlah rekening kredit	673	106	779
	Penagihan	jumlah rekening kredit	673	106	779
2	Akuntansi	jam kerja	11769	18831	30600
	Umum	proporsi per produk			
	Personalia	jam kerja	11769	18831	30600
	Internal Auditor	jam kerja	11769	18831	30600
	Dana	jam kerja	11769	18831	30600

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Alokasi dasar alokasi biaya pada masing-masing produk diatas diperoleh dari perhitungan di bawah ini:

- a. Pada aktivitas yang terkait dengan proses inti kredit menggunakan dasar alokasi biaya berupa jumlah pengajuan kredit dalam setahun dan jumlah rekening kredit yang diterima oleh BPR.
- b. Pada aktivitas umum pengalokasian biaya dilakukan secara merata bagi masing-masing produk, karena PT BPR XYZ tidak melakukan pengalokasian secara mendetail terhadap masing-masing produk. Selain itu sifat dari aktivitas umum merupakan aktivitas penopang (*sustaining activities*) bagi kegiatan operasional BPR.
- c. Pada aktivitas akuntansi, personalia, *internal auditor*, dan dana dilakukan perhitungan berdasarkan jumlah waktu rata-rata yang dibutuhkan dalam proses kredit per produk.

- Kredit konsumtif membutuhkan rata-rata 5 hari dalam proses kredit
- Kredit modal kerja membutuhkan rata-rata 8 hari dalam proses kredit

sehingga perhitungan alokasi dasar alokasi biaya per masing-masing produk sebagai berikut:

- Dasar alokasi biaya produk kredit konsumtif = $30600 \times 5/(5+8) = 11769$
- Dasar alokasi biaya produk kredit modal kerja = $30600 \times 8/(5+8) = 18831$

4.2.5 Menghitung Tarif per Unit dari Masing-Masing Dasar Alokasi Biaya yang Digunakan untuk Mengalokasikan Biaya Tidak Langsung ke Produk

Pada tahap menghitung tarif per unit dari masing-masing dasar alokasi biaya, penulis melakukan penghitungan tarif per unit dengan rumus:

$$\text{Tarif per unit Biaya Tidak Langsung} = \frac{\text{biaya aktivitas}}{\text{kuantitas dasar alokasi biaya}}$$

Tabel 4.13
Perhitungan Tarif per Unit Dasar Alokasi Biaya

No	Proses Inti (1)	Aktivitas (2)	Biaya Tidak Langsung (3)	Dasar Alokasi Biaya (4)		Tarif/Unit (5)=(3)/(4)
1	Kredit	Pembukaan	Rp83,974,436	838	jumlah pengajuan kredit	Rp100,208
		Analisa	Rp58,504,724	838	jumlah pengajuan kredit	Rp69,815
		Administrasi	Rp14,314,820	838	jumlah pengajuan kredit	Rp17,082
		Pencairan	Rp19,714,820	779	jumlah rekening kredit	Rp25,308
		Penagihan	Rp92,974,436	779	jumlah rekening kredit	Rp119,351
2	Dana dan Umum	Akuntansi	Rp21,600,000	30600	jam kerja	Rp706
		Umum	Rp399,397,900		proporsi per produk	
		Personalia	Rp8,100,000	30600	jam kerja	Rp265
		Internal Auditor	Rp18,000,000	30600	jam kerja	Rp588
		Dana	Rp34,289,904	30600	jam kerja	Rp1,121

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Tabel 4.13 di atas menjelaskan perhitungan tarif per unit biaya tidak langsung. Tarif per unit digunakan untuk mengalokasikan konsumsi sumber daya oleh aktivitas kepada masing-masing produk pada tahap selanjutnya.

4.2.6 Menghitung Biaya Tidak Langsung yang Dialokasikan ke Produk

Tahapan ini merupakan tahap pengalokasian biaya *overhead* kepada produk yang menjadi objek biaya. Pada tahap ini biaya dibebankan ke masing-masing produk berdasarkan konsumsi sumber daya dari masing-masing produk. Pengalokasian biaya *overhead* ke produk menggunakan rumus:

$$\text{Total Biaya Tidak Langsung} = \text{Tarif/unit} \times \text{dasar alokasi biaya}$$

Perhitungan biaya *overhead* kredit konsumtif dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut.

Tabel 4.14 Perhitungan Biaya Tidak Langsung Produk Kredit Konsumtif

No	Aktivitas	Tarif/Unit	Dasar Alokasi Biaya Produk Kredit Konsumtif	Total
1	Pembukaan	Rp100,208	708	Rp70,947,376
	Analisa	Rp69,815	708	Rp49,428,812
	Administrasi	Rp17,082	708	Rp12,094,144
	Pencairan	Rp25,308	673	Rp17,032,187
	Penagihan	Rp119,351	673	Rp80,323,229
2	Akuntansi	Rp706	11769	Rp8,307,692
	Umum			Rp199,698,950
	Personalia	Rp265	11769	Rp3,115,385
	Internal Auditor	Rp588	11769	Rp6,923,077
	Dana	Rp1,121	11769	Rp13,188,425
Total Biaya Kredit Konsumtif				Rp461,059,276

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Perhitungan biaya *overhead* pada produk kredit modal kerja dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut.

Tabel 4.15
Perhitungan Biaya Tidak Langsung Produk Kredit Modal Kerja

No	Aktivitas	Tarif/Unit	Dasar Alokasi Biaya Produk Kredit Modal Kerja	Total
1	Pembukaan	Rp100,208	130	Rp13,027,060
	Analisa	Rp69,815	130	Rp9,075,912
	Administrasi	Rp17,082	130	Rp2,220,676
	Pencairan	Rp25,308	106	Rp2,682,633
	Penagihan	Rp119,351	106	Rp12,651,207
2	Akuntansi	Rp706	18831	Rp13,292,308
	Umum			Rp199,698,950
	Personalia	Rp265	18831	Rp4,984,615
	Internal Auditor	Rp588	18831	Rp11,076,923
	Dana	Rp1,121	18831	Rp21,101,479
Total Biaya Kredit Modal Kerja				Rp289,811,764

Sumber: Hasil Olahan Penulis

4.2.7 Mengalokasikan Biaya Tidak Langsung Setiap Produk Terhadap Suku Bunga Kredit

Pada tahap ini penulis melakukan alokasi biaya tidak langsung yang dikonsumsi setiap per produk terhadap suku bunga kredit. Menurut Suyatno dkk (2007) mengungkapkan cara perhitungan alokasi biaya tidak langsung/*overhead* dengan rumus:

$$\text{Overhead Cost} = \frac{\text{Total Biaya (non bunga)}}{\text{Total Earning Assets}}$$

Berdasarkan perhitungan biaya dengan metode ABC diperoleh data biaya tidak langsung untuk produk kredit konsumtif sebesar Rp 461.059.276 dan biaya tidak langsung untuk produk kredit modal kerja sebesar Rp 289.811.764. Data mengenai biaya tidak langsung per produk dapat dilihat pada tabel 4.16 di bawah ini.

Tabel 4.16
Data Biaya *Overhead* per Produk Kredit

Produk Kredit	Biaya Overhead (ABC)
Kredit Konsumtif	Rp461,059,276
Kredit Modal Kerja	Rp289,811,764
Total	Rp750,871,040

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Sementara itu, data aktiva produktif pada PT BPR XYZ diperoleh dari akumulasi akun kredit yang diberikan dan penempatan pada bank lain. Data aktiva produktif pada PT BPR XYZ dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut.

Tabel 4.17
Data Aktiva Produktif tahun 2009

Aktiva Produktif	Nilai
Kredit yang Diberikan	Rp2,612,408,000.00
Penempatan pada Bank Lain	Rp103,656,000.00
Total	Rp2,716,064,000.00

Sumber: PT BPR XYZ

Dari data-data di atas, penulis dapat mengkalkulasikan alokasi biaya tidak langsung terhadap suku bunga kredit dengan cara membagi biaya tidak langsung dengan total aktiva produktif. Tabel 4.18 di bawah ini menjelaskan rincian perhitungan alokasi biaya *overhead*.

Tabel 4.18
Perhitungan Alokasi Biaya *Overhead* per Produk

Produk Kredit (1)	Biaya Overhead (ABC) (2)	Aktiva Produktif (3)	Alokasi Biaya Overhead (4)=(2) / (3)
Kredit Konsumtif	Rp461,059,276.00	Rp2,716,064,000.00	16.98%
Kredit Modal Kerja	Rp289,811,764.00	Rp2,716,064,000.00	10.67%

Sumber: Hasil Olahan Penulis

4.3 Perhitungan Suku Bunga Kredit dengan Alokasi Biaya *Overhead* Hasil ABC

Dalam menentukan suku bunga kredit bank perlu memperhitungkan unsur pembentuk suku bunga kredit, yaitu:

a. *Cost of Loanable Fund*

Unsur pembentukan kredit pertama yaitu *cost of loanable fund*, adalah biaya atas dana yang disimpan oleh deposan PT BPR XYZ. Berbeda dengan bank umum, BPR tidak diwajibkan melakukan pencadangan dalam bentuk Giro Wajib Minimum (GWM), namun bila mengacu pada PBI No. 11/20/PBI/2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus, BPR perlu melakukan pencadangan dalam bentuk *Cash Ratio* yaitu perbandingan antara alat likuid terhadap hutang lancar sebesar 3%. Tabel 4.19 menunjukkan perhitungan *cost of loanable fund* berdasarkan data laporan keuangan.

Tabel 4.19
Perhitungan *Cost of Loanable Fund*

Sumber Dana	Jumlah Dana	Komposisi Dana	Tingkat Bunga Rata-Rata	Cash Ratio	Bunga Efektif	Kontribusi Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)/(100%-3%)	(7)=(3)*(6)
Tabungan	Rp237,835.00	49.83%	10%	3%	10.31%	5.14%
Deposito Berjangka	Rp239,500.00	50.17%	10%	3%	10.31%	5.17%
	Rp477,335.00	100.00%				10.31%

Sumber: Hasil Olahan Penulis

b. Cadangan Risiko Kredit Macet

Unsur kedua adalah risiko kredit yaitu dengan cara membagi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dengan Kredit yang Diberikan.

$$\text{Cadangan Risiko Kredit Macet} = \frac{\text{PPAP}}{\text{Kredit yang diberikan}}$$

Tabel 4.20 menunjukkan perhitungan pembentukan penyisihan aktiva produktif dengan menggunakan tarif sesuai PBI No. 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif dengan Kredit.

Tabel 4.20 Perhitungan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif

Kualitas Kredit	Tarif Pencadangan	Modal Kerja	PPAP	Konsumtif	PPAP
Macet	100.0%	Rp141,773,86 8	Rp141,773,86 8	Rp67,332,132	Rp67,332,132
Diragukan	50.0%	Rp118,047,25 8	Rp59,023,629	Rp56,063,742	Rp28,031,871
Kurang Lancar	10.0%	Rp209,757,60 6	Rp20,975,761	Rp99,619,394	Rp9,961,939
Lancar	0.5%	Rp439,506,26 8	Rp2,197,531	Rp1,480,307,73 2	Rp7,401,539
		Jumlah	Rp223,970,78 9	Jumlah	Rp112,727,48 1

Tabel 4.21 menunjukkan perhitungan risiko kredit macet yaitu dengan membagi PPAP dengan total kredit yang diberikan.

Tabel 4.21

Perhitungan Cadangan Risiko Kredit Macet

Produk	PPAP	Kredit yang Diberikan	Risiko Kredit
Kredit Modal Kerja	Rp223,970,789	Rp2,612,408,000	8.57%
Kredit Konsumtif	Rp112,727,481	Rp2,612,408,000	4.32%

Sumber: Hasil Olahan Penulis

c. *Biaya Overhead*

Unsur ketiga adalah biaya *overhead*. Berdasarkan perhitungan sebelumnya diperoleh data alokasi biaya *overhead* untuk setiap produk yaitu produk kredit konsumtif sebesar 16.98% dan produk kredit modal kerja sebesar 10.67% seperti tertera pada tabel 4.22 berikut.

Tabel 4.22
Alokasi Biaya *Overhead* Terhadap Suku bunga Kredit

Produk Kredit	Alokasi Biaya <i>Overhead</i>
Kredit Konsumtif	16.98%
Kredit Modal Kerja	10.67%

Sumber: Hasil Olahan Penulis

d. Laba yang Diinginkan

Unsur keempat adalah laba yang diinginkan. Besar kecilnya unsur laba yang diinginkan sebagai unsur pembentuk suku bunga kredit didasarkan pada kebijakan pada manajemen PT BPR XYZ yaitu berkisar antara 2% hingga 5%. Kondisi calon debitur, khususnya eksposur risiko bagi BPR merupakan faktor yang dipertimbangkan oleh PT BPR XYZ dalam menentukan alokasi laba yang diinginkan, maksudnya semakin rendah risiko kredit debitur maka alokasi laba yang diinginkan semakin rendah, sebaliknya semakin tinggi risiko kredit debitur maka alokasi laba yang diinginkan semakin tinggi. Rata-rata besaran persentase target laba yang diinginkan dan dibebankan oleh manajemen PT BPR XYZ kepada debitur sebesar 2%.

e. Pajak

Unsur terakhir adalah pajak, yaitu pembebanan pajak atas penentuan laba yang diinginkan sebagai unsur pembentuk suku bunga kredit. Manajemen PT BPR XYZ tidak membebankan pajak kepada mayoritas debitur, hal tersebut bertujuan agar suku bunga kredit PT BPR XYZ dapat bersaing di pasar.

Berdasarkan unsur pembentuk suku bunga kredit di atas, tabel 4.23 di bawah ini menjelaskan alokasi tiap unsur pembentuk kredit terhadap suku bunga kredit PT BPR XYZ.

Tabel 4.23 Perhitungan Suku bunga Kredit Hasil ABC

No.	Pembentuk Kredit	Kredit	
		Konsumtif	Modal Kerja
1	<i>Cost of Loanable Fund</i>	10.31%	10.31%
2	Cadangan Resiko Kredit Macet	4.32%	8.57%
3	Alokasi <i>Overhead Cost</i>		
	a. Kredit Konsumtif*	16.98%	
	b. Kredit Modal Kerja**		10.67%
4	Laba yang Diinginkan	2.00%	2.00%
5	Pajak	0.00%	0.00%
Suku Bunga Kredit		33.61%	31.55%

Sumber: Hasil Olahan Penulis

4.4 Perbandingan Suku Bunga Kredit pada PT BPR XYZ dengan Suku Bunga Kredit Hasil Perhitungan ABC

PT BPR XYZ menerapkan suku bunga kredit hanya berdasarkan asumsi kebijakan manajemen yaitu dengan mempertimbangkan kondisi calon debitur, suku bunga pesaing, dan faktor eksternal lain yang mempengaruhi penentuan suku bunga. Tabel 4.24 menggambarkan selisih suku bunga kredit pada PT BPR XYZ dengan suku bunga kredit melalui perhitungan ABC.

Tabel 4.24
Perbandingan Suku bunga Kredit ABC dan Tradisional

Produk Kredit	Suku Bunga Kredit (ABC)	Suku Bunga Tradisional	Selisih
Kredit Konsumtif	33.61%	30.00%	3.61%
Kredit Modal Kerja	31.55%	30.00%	1.55%

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil perhitungan suku bunga kredit menggunakan alokasi biaya *overhead* dengan *Activity Based Costing* untuk suku bunga kredit konsumtif adalah 33.61% dan suku bunga kredit modal kerja sebesar 31.55%. Bila dibandingkan dengan suku bunga tradisional sebesar 30% untuk semua produk kredit pada PT BPR XYZ diperoleh adanya perbedaan pada suku bunga konsumtif sebesar 3.61% (*undercosting*) dan suku bunga kredit modal kerja sebesar 1.55% (*undercosting*). Data menunjukkan bahwa suku bunga kredit yang ditetapkan oleh manajemen PT BPR XYZ tidak mampu menutupi seluruh biaya bank, keadaan tersebut menyebabkan PT BPR XYZ mengalami kerugian pada tahun yang diteliti.

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya distorsi pembebanan biaya *overhead* pada penetapan suku bunga tradisional, karena alokasi biaya *overhead* pada suku bunga tradisional hanya didasarkan pada kebijakan estimasi dari manajemen PT BPR XYZ dengan mempertimbangkan kondisi calon debitur, suku bunga pesaing, dan faktor eksternal lain yang mempengaruhi penentuan suku bunga, sedangkan pembentukan suku bunga dengan alokasi biaya *overhead* menggunakan ABC dirasa lebih baik dalam menginformasikan konsumsi sumber daya oleh setiap objek biaya, karena ABC menggunakan lebih banyak *cost driver*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bamber dan Hughes II (2001) yang menerapkan ABC pada The Buckeye National Bank. Pada penelitian Bamber dan Hughes II (2001) diperoleh hasil penelitian yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil perhitungan biaya pada lini nasabah retail dan lini nasabah bisnis dengan metode tradisional dan metode ABC.

Tabel 4.25 Laporan Laba Rugi PT BPR XYZ Tahun 2009

No	Pos-Pos	Posisi Desember 2009	Posisi Desember 2008
	PENDAPATAN		
1	Pendapatan Operasional	1,092,757	1,122,219
2	Pendapatan Non Operasional	0	0
3	Jumlah Pendapatan	1,092,757	1,122,219
	BEBAN		
5	Beban Operasional	1,309,370	1,138,257
7	Beban non operasional	0	0
8	Jumlah beban	1,309,370	1,138,257
9	Laba/rugi sebelum pajak penghasilan (PPh)	-216,613	-16,038
10	Taksiran pajak penghasilan	0	0
11	Laba/rugi tahun berjalan	-216,613	-16,038

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada bab ini akan dijelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang ditujukan untuk mengevaluasi tingkat suku bunga kredit pada PT BPR XYZ dengan alokasi biaya *overhead* menggunakan sistem *Activity Based Costing* (ABC). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis di PT BPR XYZ, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT BPR XYZ menerapkan suku bunga kredit berdasarkan asumsi kebijakan manajemen yaitu dengan mempertimbangkan kondisi calon debitur, suku bunga pesaing, dan faktor eksternal lain yang mempengaruhi penentuan suku bunga. Pada tahun 2009, tingkat suku bunga kredit yang ditetapkan oleh manajemen sebesar 30%.
2. Perhitungan biaya *overhead* dengan menggunakan sistem ABC dilakukan dengan mengaplikasikan tujuh langkah yang dikemukakan oleh (Horngren, 2009). Pada dasarnya pengimplementasian ABC didahului dengan menelusuri konsumsi sumber daya oleh aktivitas yang menimbulkan biaya dan selanjutnya pembebanan biaya aktivitas ke produk. Berdasarkan hasil perhitungan suku bunga kredit pada PT BPR XYZ dengan alokasi biaya *overhead* menggunakan sistem ABC diperoleh suku bunga kredit konsumtif adalah 33.61% dan suku bunga kredit modal kerja sebesar 31.55%.
3. Apabila dilakukan perbandingan antara hasil perhitungan suku bunga kredit pada PT BPR XYZ dengan alokasi biaya *overhead* menggunakan sistem ABC dan metode tradisional, diperoleh suku bunga kredit dengan metode ABC yang lebih besar daripada

suku bunga kredit tradisional. Selisih sebesar 3.61% (*undercosting*) pada suku bunga konsumtif dan suku bunga kredit modal kerja sebesar 1.55% (*undercosting*), menunjukkan suku bunga kredit yang ditetapkan oleh manajemen PT BPR XYZ tidak mampu menutupi seluruh biaya bank, keadaan tersebut menyebabkan PT BPR XYZ mengalami kerugian pada tahun yang diteliti. Perbedaan tersebut disebabkan karena pembebanan biaya *overhead* pada suku bunga kredit masing-masing produk, pada metode penetapan suku bunga kredit tradisional hanya didasarkan pada asumsi kebijakan manajemen yang mempertimbangkan kondisi calon debitur, kondisi suku bunga pesaing, dan faktor eksternal lain yang mempengaruhi penentuan suku bunga, sedangkan pada metode penetapan suku bunga kredit dengan sistem ABC, biaya *overhead* pada masing-masing produk dibebankan pada banyak *cost driver* yang menggambarkan konsumsi sumber daya aktivitas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil perhitungan alokasi biaya *overhead* dengan sistem ABC terhadap penetapan suku bunga kredit PT BPR XYZ, diharapkan PT BPR XYZ perlu untuk mempertimbangkan untuk menggunakan sistem ABC sebagai metode perhitungan suku bunga kredit. Sistem ABC dapat digunakan oleh komisaris dan manajemen BPR dalam menyusun rencana anggaran bank khususnya dalam penetapan *Base Lending Rate* dan *target spread*. Dengan menggunakan sistem ABC maka manajemen dapat memilih strategi efisiensi yakni dengan menurunkan *overhead cost* guna mencapai *target spread* yang diinginkan atau menurunkan *target spread* bila *overhead cost* sulit untuk diturunkan

Sistem ABC merupakan pendekatan pembentukan suku bunga kredit bank yang berorientasi pada biaya. Selain berorientasi pada biaya, PT BPR XYZ tetap harus berorientasi pada perilaku pasar yaitu dengan memperhatikan tingkat suku bunga kredit yang ditetapkan oleh pesaing dan kemampuan masyarakat sebagai debitur PT BPR XYZ yang tidak dapat dipungkiri juga mempengaruhi penetapan suku bunga kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar. (1999). "Activity Based Costing System: Sistem Alokasi Biaya Overhead dalam Industri Modern". *Jurnal Ekonomi KIAT*. Vol I No. 4 Tahun 1999 Hal 60-71. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
- Askarany, Davood dan Hassan Yazdifar. (2007). "Why ABC is Not Widely Implemented?". *International Journal of Business Research*. Volume VII Number 1.
- Bamber, Linda Smith dan K.E Hughes II. (2001). "Activity Based Costing in the Service Sector: The Buckeye National Bank". *Accounting Education*. Volume XVI No.3.
- Bastian, Indra dan Suhardjono. (2006). *Akuntansi Perbankan Buku 2. Edisi Pertama*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Femala, Fieda. (2007). "Penerapan Metode Activity Based Costing System Dalam Menentukan Besarnya Tarif Jasa Rawat Inap (Studi pada RSUD Kabupaten Batang)". Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Finoza, Lamuddin. (2008). *Komposisi Bahasa Indonesia. Cetakan ke 16*. Jakarta: Penerbit Diksi Insan Mulia.
- Helms, Brigit dan Lorna Grace. (2004). "Microfinance Product Costing Tool". *Technical Tools Series No.6. Consultative Group to Assist the Poor (CGAP)/ The World Bank Group*.
- Helms, Brigit. (1998). "Cost Allocation for Multi-Service Micro-Finance Institutions". *Consultative Group to Assist the Poor (CGAP)*
- Hornigren, Charles T., dkk. (2009). *Cost Accounting: A Managerial Emphasis. 13th edition*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Kasmir. (2002). *Dasar-Dasar Perbankan. Cetakan ke 2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lapoliwa, N. dan Kuswandi, Daniel S. (2000). *Akuntansi Perbankan: Akuntansi Transaksi Bank Dalam Valuta Rupiah Jilid 1. Edisi ke 5*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Muljono, Teguh Pudjo. (1991). *Bank Auditing: Petunjuk Pemeriksaan Intern Bank. Cetakan ke 3*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Mulyadi. (1984). *Akuntansi Biaya Untuk Manajemen. Cetakan Pertama*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.

- Peraturan Bank Indonesia No. 6/22/PBI/2004 Tahun 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 Tahun 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/20/PBI/2006 Tahun 2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/20/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus.
- Rasyid, Rosmita. (1999). "Sulitnya Menurunkan Suku Bunga Kredit Bank". *Jurnal Ekonomi Universitas Tarumanegara*. Vol IV No. 1 Tahun 1999 Hal 60-67. Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara.
- Sanjaya, I Putu Sugiarta. (2004). "Penerapan *Activity Based Costing* (ABC) pada Sektor Jasa". *Jurnal Ekonomi*. Vol XIV No. 38 Tahun 2004 Hal 7-15. Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Siamat, Dahlan. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan. Edisi ke 5*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sidharta, Juaniva dan Yessica. (2008). "Perbandingan Penerapan Metode Tradisional dengan Metode *Activity Based Costing* dalam Memperhitungkan Biaya Produksi pada Perusahaan XYZ". *Buletin Ekonomi*. Vol. XII No.2.
- Siswanto. (2004). "*Activity Based Costing* Sebagai Metode Alternatif Meraih Keunggulan Kompetitif". *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*. Vol. III No.1- Tahun 2004 Hal 71-77. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sudaryati, Erina. (1993). "ABC System: Perlakuan Baru dalam Membebaskan Biaya Overhead Pabrik". *Majalah Ekonomi*. Vol III No. 9-10 Tahun 1993 Hal 40-45. Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
- Surat Edaran No. 8/30/DPBR tahun 2006 perihal Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat
- Suyatno, Thomas, dkk. (2007). *Dasar-Dasar Perkreditan. Edisi Keempat*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama

- SW, Suprihatmi. (2003). "Alternatif *Activity Based Costing* dalam Menentukan Harga Pokok Produksi yang Akurat". *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Universitas Slamet Riyadi Surakarta*. Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
- Tim Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat. (2010). *Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat. Cetakan Pertama*. Jakarta: Bank Indonesia kerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia
- Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan. (2001). *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Revisi 2001. Cetakan Pertama*. Jakarta: Bank Indonesia kerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta Penjelasannya.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 beserta Penjelasannya.
- Yulifah, Lilis. (2000). "Penggunaan *Activity Based Costing* Untuk Meningkatkan Keakuratan Penghitungan Biaya Produk". *Kinerja Universitas Islam Bandung*. Vol II No. 1 Tahun 2000 Hal 43-56. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung.

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

PT. BPR XYZ
 JL COKROAMINOTO NO.52 KREO SELATAN-CILEDUG
 Periode: Desember - 2009

LAPORAN NERACA

(Ribuan Rp.)

No	Pos-Pos	Posisi Desember 2009	Posisi Desember 2008
	AKTIVA		
1	Kas	9,609	9,449
2	Sertifikat Bank Indonesia	0	0
3	Antarbank Aktiva		
	a. Pada bank umum	103,655	82,580
	b. Pada BPR	0	0
4	Kredit yang diberikan		
	a. Pihak terkait	2,401	54,791
	b. Pihak tidak terkait	2,610,007	3,319,777
5	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif -/-	343,992	169,971
6	Aktiva dalam valuta asing	0	0
7	Aktiva tetap dan inventaris		
	a. Tanah dan gedung	370,000	370,000
	b. Akumulasi penyusutan gedung -/-	143,322	132,903
	c. Inventaris	45,236	22,161
	d. Akumulasi penyusutan inventaris -/-	13,717	2,693
8	Aktiva Lain-lain	200,500	17,000
	Jumlah Aktiva	2,840,377	3,570,191

No	Pos-Pos	Posisi Desember 2009	Posisi Desember 2008
	PASSIVA		
1	Kewajiban-kewajiban yang segera dapat dibayar	8,631	24,650
2	Tabungan		
	a. Pihak terkait	173,829	352,254
	b. Pihak tidak terkait	64,006	73,737
3	Deposito berjangka		
	a. Pihak terkait	129,500	84,500
	b. Pihak tidak terkait	110,000	0
4	Kewajiban kepada Bank Indonesia	0	0
5	Antarbank pasiva	0	0
6	Pinjaman yang diterima	1,072,657	2,286,683
7	Pinjaman subordinasi	0	0
8	Rupa-rupa Pasiva	900,000	150,000
9	Ekuitas :		
	a. Modal dasar	5,000,000	5,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	3,750,000	3,750,000
	c. Agio	0	0
	d. Disagio -/-	0	0
	e. Modal sumbangan	0	0
	f. Modal pinjaman	0	0
	g. Dana setoran modal	0	0
	h. Cadangan revaluasi aktiva tetap	0	0
	i. Cadangan umum	0	0
	j. Cadangan tujuan	0	0
	k. Laba yang ditahan	-651,633	-635,595
	l. Saldo Laba (Rugi) tahun berjalan	-216,613	-16,038
	Jumlah Pasiva	2,840,377	3,570,191

Laporan Laba Rugi

(Ribuan Rp.)

No	Pos-Pos	Posisi Desember 2009	Posisi Desember 2008
	PENDAPATAN		
1	Pendapatan Operasional		
	a.Bunga	972,741	1,014,958
	b.Provisi dan Komisi	25,287	33,352
	c.Lainnya	94,729	73,909
2	Jumlah Pendapatan Operasional	1,092,757	1,122,219
3	Pendapatan Non Operasional	0	0
4	Jumlah Pendapatan	1,092,757	1,122,219
	BEBAN		
5	Beban Operasional		
	a.Beban bunga	558,499	720,951
	b.Beban administrasi dan umum	393,045	94,487
	c.Beban Personalia	306,899	228,725
	d.Penyisihan aktiva produktif	0	75,838
	e.Beban operasional lainnya	50,927	18,256
6	Jumlah beban operasional	1,309,370	1,138,257
7	Beban non operaasional	0	0
8	Jumlah beban	1,309,370	1,138,257
9	Laba/rugi sebelum pajak penghasilan (PPh)	-216,613	-16,038
10	Taksiran pajak penghasilan	0	0
11	Laba/rugi tahun berjalan	-216,613	-16,038

Laporan Komitmen dan Kontinjensi

(Ribuan Rp.)

No	Pos-Pos	Posisi Desember 2009	Posisi Desember 2008
	KOMITMEN		
1	Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum ditarik	0	0
2	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	0	0
3	Lain-lain	0	3,150
	JUMLAH KOMITMEN	0	3,150
	KONTINJENSI		
1	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	0	0
2	Lain-lain	55,269	56,569
	JUMLAH KONTINJENSI	55,269	56,569

Laporan Kualitas Aktiva Produktif & Informasi Lainnya

(Ribuan Rp.)

Keterangan	L	KL	D	M	Jumlah
1. Penempatan pada bank lain	103,656	0	0	0	103,656
2. Kredit yang diberikan	-	-	-	-	-
a. Kepada pihak terkait	22,757	0	0	7,538	30,295
b. Kepada pihak tidak terkait	1,897,057	309,377	174,111	201,568	2,582,113
3. Jumlah Aktiva Produktif	2,023,470	309,377	174,111	209,106	2,716,064
4. NPL Net (%)	-	-	-	-	15.65
5. Rasio KPMM (%)	-	-	-	-	21.55
6. Loan to Deposit Ratio (%)	-	-	-	-	84.97
7. Return on Asset (ROA) (%)	-	-	-	-	0.45

PENGURUS BANK PEMILIK BANK

Dewan Komisaris:	Pemegang Saham:
Budi Sutrisno	DR. Elias L Tobing (52.00%)
Wahyu E Kurnia	Ny Ratna T Parapat (16.00%)
	Leonard Lolurapaja (16.00%)
	Ny Emma Christdora (16.00%)
Direksi:	Pemegang Saham Pengendali:
DR. Elias L Tobing	DR. Elias L Tobing

* Laporan Publikasi ini belum diaudit

* Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia No.8/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Bank Indonesia No.8/30/DPBPR tanggal 12 Desember 2006 perihal Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR

* Bagi BPR dengan total asset Rp.10 Milyar atau lebih wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab terhadap audit (partner in-charge)

Provinsi Banten, 31 - Desember - 2009

DIREKSI
PT. BPR XYZ

